



BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Deiyai tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Ranka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2022 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
19. Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 43);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pegelolahan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
38. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
39. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
40. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2017 Nomor 09);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019 Nomor 3).

55. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.143.273.274.600,00 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.114.851.441.998,00 (Seratus Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.952.960.414,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 110.988.554.688,00 (seratus sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.909.926.896,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp.1.952.960.414,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak restoran;
 - b. Pajak reklame;
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
 - d. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.261.800.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.261.800.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Kain.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Pasir dan Kerikil.
- (5) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 166.160.414,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas Opsen BBNKB.

Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp. 110.988.554.688,00 (Seratus sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas

- penyertaan modal pada BUMD; dan
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 988.554.688,00 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
 - (3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 110.000.000.000,00 (Seratus sepuluh milyar Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp. 1.909.926.896,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - c. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. Pendapatan dari pengembalian.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
- (3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.252.847.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 237.079.896,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.023.421.832.602,00 (Satu Triliun Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.017.266.353.000,00 (Satu Triliun Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.6.155.479.602,00 (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.017.266.353.000,00 (Satu Triliun Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur;
 - c. Dana Desa; dan
 - d. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.017.266.353.000,00 (Satu Triliun Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.129.068.387.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 63.756.350.000,00 (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- (5) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.221.581.000,00 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.017.266.353.000,00 (Satu Triliun Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 193.585.788.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 508.211.275.000,00 (Lima ratus delapan milyar dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 43.874.397.000,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.71.548.575.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.129.068.387.000,00 (Seratus dua puluh sembilan milyar enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus 1%-Papua sebesar Rp. 47.538.260.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua sebesar Rp. 67.705.522.000,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - c. DTI-Papua sebesar Rp.13.824.605.000,00 (Tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah)
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebesar Rp.63.756.350.000,00 (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp.7.221.581.000,00 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.6.155.479.602,00 (Enam Milyar Seratus Lima

Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.6.155.479.602,00 (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 286.355.774,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 1.447.483.812,00 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah);
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp. 3.621.640.016,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Belas Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.142.884.425.756,00 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- e. Belanja Operasi;
- f. Belanja Modal;
- g. Belanja Tidak Terduga; dan
- h. Belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp. 749.853.334.888,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang Dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 293.882.311.430,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 360.225.923.458,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 77.175.100.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.18.570.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 293.882.311.430,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 183.319.076.897,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.100.601.998.282,00 (Seratus Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.4.512.848.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 9.379.556.220,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 179.680.031,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 402.000.000,00 (Empat ratus dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 183.319.076.897,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja tunjangan khusus*).
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 125.367.073.098,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus

Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 8.572.219.802,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.145.127.239,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.044.266.306,00 (Dua Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.517.186.608,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 10.547.393.963,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 700.730.672,00 (Tujuh Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 1.600.330,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 17.766.946.712,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 191.675.088,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 575.418.401,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Khusus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 10.889.438.678,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan

Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp.100.601.998.282,00 (Seratus Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 92.134.462.078,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.070.888.204,00 (Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 883.800.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sebesar Rp.4.512.848.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan
 - d. Belanja Jasa Kantor.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.3.678.811.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.500.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.251.537.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 9.379.556.220,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.563.010.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 78.821.400,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 56.301.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 816.364.500,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 65.863.350,00 (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 7.033.950,00 (Tujuh Juta Tiga

Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 2.562.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 1.023.750.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 796.689.660,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 2.059.722.360,00 (Dua Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 1.140.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 179.680.031,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.55.380.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.174.800,00 (Empat Juta Seratus Tujuh Puluh

Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.99.684.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.7.623.390,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.909.809,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.80.832,00 (Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.6.370.432,00 (Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.2.114.192,00 (Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.2.342.576,00 (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 402.000.000,00 (Empat Ratus Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 360.225.923.458,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga

Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 176.357.974.806,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.83.536.972.652,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 747.352.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Uh Rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 79.322.372.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.231.400.000,00 (Enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 14.029.852.000,00 (Empat Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 176.357.974.806,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 83.536.972.652,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Lima

Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 71.654.393.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.746.609.852,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.574.360.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.327.100.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.2.950.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 438.509.800,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) huruf c sebesar Rp. 747.352.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebesar Rp. 681.730.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 65.622.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 79.322.372.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.231.400.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 6.231.400.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 14.029.852.000,00 (Empat Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS; dan

- d. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 14.014.852.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 77.175.100.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 50.416.482.000,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.23.753.370.000,00 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.855.248.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 50.416.482.000,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial

- yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.950.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 36.266.482.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 23.753.370.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta;
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 22.649.810.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.103.560.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 18.570.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.570.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp 9.570.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 9.570.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 34

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp. 264.855.464.268,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigas;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 26.333.745.553,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 98.266.932.968,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu

Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 138.342.626.200,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.509.159.547,00 (Satu milyar lima ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 403.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Juta Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 26.333.745.553,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan;
 - b. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - c. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - d. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - e. Belanja modal alat laboratorium; dan
 - f. Belanja modal komputer.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 11.479.400.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.573.916.800,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 164.234.500,00 (Seratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.492.732.600,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.668.020.000,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua puluh ribu Rupiah).

- (7) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 2.350.518.100,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu seratus Rupiah).

Pasal 37

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 11.479.400.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.573.916.800,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor; dan
 - b. Belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 458.277.800,00 (Empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.115.639.000,00 (Tiga milyar seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 164.234.500,00 (Seratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Komunikasi.

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 2.492.732.600,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 407.783.300,00 (Empat ratus tujuh juta tujuh ratus delapan

puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.084.949.300,00 (Dua milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah).

Pasal 41

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.668.020.000,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua puluh ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 2.350.518.100,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu seratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.709.800.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 640.718.100,00 (Enam ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 98.266.932.968,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 87.595.398.938,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 10.671.534.030,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 87.595.398.938,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 62.802.379.378,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 24.793.019.560,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 45

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 10.671.534.030,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 138.342.626.200,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 128.438.469.200,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 8.776.157.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

sebesar Rp. 1.128.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 128.438.469.200,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 126.613.864.200,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.824.605.000,00 (Satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 8.776.157.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.287.005.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.989.152.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.128.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua

Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. Belanja modal instalasi air kotor;
 - c. Belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
 - d. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.509.159.547,00 (Satu milyar lima ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan dengan rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.

Pasal 51

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebesar Rp. 121.175.626.600,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 63.756.350.000,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima

Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 57.419.276.600,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 53

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 611.151.156,00 (Enam ratus sebelas juta seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 54

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a sebesar Rp. 111.151.156,00 (Seratus sebelas juta seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh enam Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan objek Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan dan rincian objek Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 55

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah dengan objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 56

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 388.848.844,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.-388.848.844,00) (Minus Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Pasal 57

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana
11. Lampiran XI Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP
12. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah.

13. Lampiran XIII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 58

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerahsesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Waghete
Pada Tanggal, 20 Desember 2024

Pj.BUPATI DEIYAI,

Ttd

ELIMELEK EDOWAI, S.Sos

Diundangkan di Waghete
Pada tanggal, 20 Desember 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI

Ttd

MELIANUS PAKAGE,S.IP,M.KP
NIP: 196905042001121004

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT BIDANG HUKUM



SIMON MOTE, S.STP
NIP. 198011102000121001



KABUPATEN DEIYAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114.851.441.998,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.952.960.414,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	261.800.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	261.800.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	261.800.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	25.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.500.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.500.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	166.160.414,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	166.160.414,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	166.160.414,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	110.988.554.688,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	988.554.688,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	988.554.688,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	988.554.688,00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	110.000.000.000,00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	110.000.000.000,00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	110.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.909.926.896,00
4.1.04.05	Jasa Giro	420.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	252.847.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	252.847.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	252.847.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	237.079.896,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	237.079.896,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	237.079.896,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.023.421.832.602,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.017.266.353.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	129.068.387.000,00
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	47.538.260.000,00
4.2.01.03.08.0003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	5.265.778.000,00
4.2.01.03.08.0004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	2.256.000.000,00
4.2.01.03.08.0007	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	14.000.000.000,00
4.2.01.03.08.0008	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	1.000.000.000,00
4.2.01.03.08.0009	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	1.200.000.000,00
4.2.01.03.08.0012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14.416.482.000,00
4.2.01.03.08.0015	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	7.500.000.000,00
4.2.01.03.08.0018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	1.900.000.000,00
4.2.01.03.11	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	67.705.522.000,00
4.2.01.03.11.0001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	26.691.400.000,00
4.2.01.03.11.0002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	22.085.836.000,00
4.2.01.03.11.0003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	18.928.286.000,00
4.2.01.03.12	DTI-Papua	13.824.605.000,00
4.2.01.03.12.0001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	13.824.605.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	63.756.350.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	63.756.350.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	63.756.350.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.221.581.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.221.581.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.221.581.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	193.585.788.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	23.270.060.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	12.779.462.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.490.598.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	169.815.728.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	168.825.907.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	190.757.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	799.064.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	500.000.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	500.000.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	508.211.275.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	380.606.978.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	380.606.978.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	127.604.297.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.389.679.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	76.693.162.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.880.236.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.641.220.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	115.422.972.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	43.874.397.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	200.000.000,00
4.2.01.09.01.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	1.681.642.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	32.492.755.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9.500.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	71.548.575.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	3.678.811.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	582.500.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	251.537.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.047.850.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	39.669.956.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	92.500.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.752.048.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	103.200.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.238.399.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.116.774.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.155.479.602,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	6.155.479.602,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.155.479.602,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	286.355.774,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	800.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.447.483.812,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.621.640.016,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.143.273.274.600,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	749.853.334.888,00
5.1.01	Belanja Pegawai	293.882.311.430,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	183.319.076.897,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	125.367.073.098,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	118.399.222.134,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.967.850.964,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	8.572.219.802,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.482.424.495,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	89.795.307,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.145.127.239,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.145.127.239,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.044.266.306,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.886.774.931,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	157.491.375,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.517.186.608,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.508.893.983,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.292.625,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.547.393.963,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.423.141.823,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	124.252.140,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	700.730.672,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	562.675.579,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	138.055.093,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.600.330,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.569.293,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	31.037,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.766.946.712,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.662.947.743,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	103.998.969,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	191.675.088,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	188.345.864,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.329.224,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	575.418.401,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	565.042.057,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	10.376.344,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	10.889.438.678,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	10.889.438.678,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	100.601.998.282,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	92.134.462.078,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91.270.627.078,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	863.835.000,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.070.888.204,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.012.993.990,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	57.894.214,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	883.800.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	883.800.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.512.848.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	3.678.811.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	582.500.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	251.537.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.379.556.220,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	563.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	563.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.821.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.821.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.000.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.000.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.301.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.301.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.364.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.364.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.863.350,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.863.350,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	7.033.950,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	7.033.950,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.562.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.562.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.023.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.023.750.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	796.689.660,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	796.689.660,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.059.722.360,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	16.682.106,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.351.224,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1.689.030,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.040.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.140.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.140.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	179.680.031,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.380.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.380.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.174.800,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.174.800,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.684.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.684.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.623.390,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.623.390,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.909.809,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.909.809,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	80.832,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	80.832,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.370.432,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.370.432,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.114.192,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.114.192,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.342.576,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.342.576,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	402.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	150.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.225.923.458,00
5.1.02.01	Belanja Barang	176.357.974.806,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	176.076.216.106,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	52.500.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.785.886.100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.593.088.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	43.384.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.976.299.800,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.954.869.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.419.447.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	135.656.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.256.678.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.018.673.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.962.575.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.559.400.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.250.450.356,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.279.479.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	775.947.100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.340.800,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	327.485.700,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.816.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	257.801.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.042.656.100,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	138.860.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.250.118.800,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.192.705.950,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.139.464.600,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	303.120.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.910.471.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.643.090.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.064.950.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	549.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	140.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	281.758.700,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	281.758.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	83.536.972.652,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	71.654.393.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.152.075.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.330.510.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	17.280.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	84.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.100.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.446.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	232.605.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.841.900.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.698.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	148.590.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.052.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	518.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	792.275.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	128.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.868.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	70.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	86.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	271.330.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.598.531.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.419.789.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	675.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	722.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.537.640.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	712.200.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.746.609.852,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	670.134.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.175.200.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	221.367.048,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	276.708.804,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	240.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	163.200.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	96.000.000,00
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	96.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.574.360.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	166.910.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.950.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	87.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.272.000.000,00
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.327.100.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	810.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	297.100.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.950.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	1.950.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.000.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	438.509.800,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	55.609.800,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	382.900.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	750.000.000,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	750.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	747.352.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	747.352.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	681.730.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	65.622.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	79.322.372.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.322.372.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.322.372.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.231.400.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.231.400.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	180.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	558.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.984.500.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	508.900.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	14.029.852.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	14.014.852.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	13.922.352.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	92.500.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	15.000.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	77.175.100.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.416.482.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.950.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.950.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.266.482.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.266.482.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	23.753.370.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.649.810.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.649.810.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.103.560.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.103.560.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	150.000.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	150.000.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	150.000.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.855.248.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.752.048.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.752.048.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	103.200.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	103.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.570.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.570.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.570.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.570.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.000.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	9.000.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	9.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	264.855.464.268,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.333.745.553,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	408.258.300,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	349.920.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	349.920.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	58.338.300,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	58.338.300,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11.479.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.479.400.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	9.279.400.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	500.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.700.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.382.625.300,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.382.625.300,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	2.382.625.300,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.573.916.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	458.277.800,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	103.883.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	354.394.300,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.115.639.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.484.666.700,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	475.868.200,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.075.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	823.551.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	325.477.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	164.234.500,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	164.234.500,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	115.566.300,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	48.668.200,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.492.732.600,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	407.783.300,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	407.783.300,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.084.949.300,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.084.949.300,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.668.020.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.668.020.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	1.570.082.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	97.938.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.350.518.100,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.709.800.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.709.800.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	640.718.100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	124.188.600,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	516.529.500,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	39.487.500,00

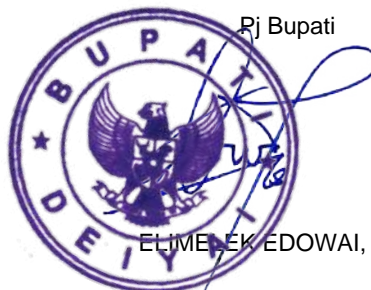
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	39.487.500,00
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	39.487.500,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	993.268.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	993.268.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	993.268.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	781.284.453,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	781.284.453,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	781.284.453,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.266.932.968,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	87.595.398.938,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.802.379.378,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	51.898.113.857,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	646.134.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.680.000.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	599.860.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	365.190.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	999.666.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	6.595.915.521,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.500.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	24.793.019.560,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	10.336.111.760,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	14.456.907.800,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.671.534.030,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	10.671.534.030,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	97.280.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	10.574.254.030,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.342.626.200,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	128.438.469.200,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	126.613.864.200,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	126.613.864.200,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.824.605.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.824.605.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.776.157.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.287.005.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.287.005.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.989.152.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.989.152.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.500.000.000,00
5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	1.500.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.128.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	26.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	26.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	24.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	24.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.000.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.000.000.000,00
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	78.000.000,00
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	78.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.509.159.547,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	27.560.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	27.560.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	27.560.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	268.650.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	268.650.000,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	268.650.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.212.949.547,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.212.949.547,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.212.949.547,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	403.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	403.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	403.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	403.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	121.175.626.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	121.175.626.600,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	121.175.626.600,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	121.175.626.600,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	63.756.350.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.419.276.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.142.884.425.756,00
	Total Surplus/(Defisit)	388.848.844,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.151.156,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.151.156,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	111.151.156,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	111.151.156,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	111.151.156,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-388.848.844,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



ELIMELEK EDOWAI, S.Sos



KABUPATEN DEIYAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.143.273.274.600,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114.851.441.998,00	
4.1.01	Pajak Daerah	1.952.960.414,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	261.800.000,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	261.800.000,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	261.800.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	25.000.000,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.500.000.000,00	
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.500.000.000,00	
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	166.160.414,00	
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	166.160.414,00	
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	166.160.414,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	110.988.554.688,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	988.554.688,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	988.554.688,00	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	988.554.688,00	
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	110.000.000.000,00	
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	110.000.000.000,00	
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	110.000.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.909.926.896,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	420.000.000,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00	
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00	

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.000.000.000,00	
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	252.847.000,00	
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	252.847.000,00	
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	252.847.000,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	237.079.896,00	
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	237.079.896,00	
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	237.079.896,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.023.421.832.602,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.017.266.353.000,00	
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	129.068.387.000,00	
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	47.538.260.000,00	
4.2.01.03.08.0003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	5.265.778.000,00	
4.2.01.03.08.0004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	2.256.000.000,00	
4.2.01.03.08.0007	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	14.000.000.000,00	
4.2.01.03.08.0008	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	1.000.000.000,00	
4.2.01.03.08.0009	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	1.200.000.000,00	
4.2.01.03.08.0012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14.416.482.000,00	
4.2.01.03.08.0015	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	7.500.000.000,00	
4.2.01.03.08.0018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	1.900.000.000,00	
4.2.01.03.11	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	67.705.522.000,00	
4.2.01.03.11.0001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	26.691.400.000,00	
4.2.01.03.11.0002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	22.085.836.000,00	
4.2.01.03.11.0003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	18.928.286.000,00	
4.2.01.03.12	DTI-Papua	13.824.605.000,00	
4.2.01.03.12.0001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	13.824.605.000,00	
4.2.01.05	Dana Desa	63.756.350.000,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	63.756.350.000,00	
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	63.756.350.000,00	
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.221.581.000,00	
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.221.581.000,00	
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.221.581.000,00	
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	193.585.788.000,00	
4.2.01.07.01	DBH Pajak	23.270.060.000,00	
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	12.779.462.000,00	

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.490.598.000,00	
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	169.815.728.000,00	
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	168.825.907.000,00	
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	190.757.000,00	
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	799.064.000,00	
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	500.000.000,00	
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	500.000.000,00	
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	508.211.275.000,00	
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	380.606.978.000,00	
4.2.01.08.01.0001	DAU	380.606.978.000,00	
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	127.604.297.000,00	
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.389.679.000,00	
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	76.693.162.000,00	
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.880.236.000,00	
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.641.220.000,00	
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	115.422.972.000,00	
4.2.01.09.01	DAK Fisik	43.874.397.000,00	
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	200.000.000,00	
4.2.01.09.01.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	1.681.642.000,00	
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	32.492.755.000,00	
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9.500.000.000,00	
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	71.548.575.000,00	
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	3.678.811.000,00	
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	582.500.000,00	
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	251.537.000,00	
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.047.850.000,00	
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	39.669.956.000,00	
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	92.500.000,00	
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.752.048.000,00	
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	103.200.000,00	
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.238.399.000,00	
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.116.774.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.155.479.602,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	6.155.479.602,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.155.479.602,00	

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	286.355.774,00	
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.447.483.812,00	
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.621.640.016,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000.000,00	
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00	
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00	
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.000.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN		
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.579.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.980.000,00	
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	23.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	602.379.000,00	

5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas		
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.124.262.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.031.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.560.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.759.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	7.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.400.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.045.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.690.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.044.500,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP		
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS		
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	7.765.838.933,00	

5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS		
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	18.933.460.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS		
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	558.013.242,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS		
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	415.723.825,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP		
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS		
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	92.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.045.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.690.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.234.500,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.980.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.050.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.233.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.500.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.666.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.611.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.642.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.586.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.360.000,00	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.938.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.616.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.866.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.760.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.713.500,00	

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.500.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	67.126.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.560.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	670.000,00	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.403.480.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.050.000,00	
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	23.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.680.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.667.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.070.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.282.500,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.780.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.600.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.750.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.660.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.800.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.040.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	446.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.560.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.734.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.260.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	4.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.500.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.815.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.127.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.318.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.240.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP		
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS		
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	3.062.912.011,00	
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS		
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.716.350.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS		
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	160.686.250,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS		
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	3.451.739,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.152.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.300.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.708.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.405.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.809.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.946.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.900.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.878.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.336.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.346.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.459.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.837.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.764.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.345.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.809.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.406.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	172.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	202.062.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium		
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah		
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	97.938.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	360.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	140.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.914.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.356.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.290.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.223.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.845.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	110.242.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP		
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD		
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.752.048.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: null		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP		
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD		
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.076.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.740.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.554.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.880.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.815.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.127.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	64.488.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.820.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	

5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.800,00	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	199.971.200,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP		
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan		
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	103.200.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.3.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.730.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.480.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	177.510.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	8.640.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	540.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP		
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS		
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	2.138.427.072,00	
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS		
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta		
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	833.160.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS		

5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	59.983.335,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS		
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	669.949.593,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.185.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.127.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	67.868.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.820.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.3.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.06.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak		
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	27.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.06.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.100.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium		
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah		
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	1.570.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.06.0039 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.730.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.480.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.510.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.940.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	

5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	8.640.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.06.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	360.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP		
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS		
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	955.173.984,00	
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS		
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta		
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	270.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS		
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.601.626,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS		

5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	123.824.390,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.06.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.360.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.217.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.702.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.920.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.800.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.3.07 Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.07.0004 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	240.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.3.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.08.0001 Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	887.900,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.160.000,00	
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	13.600.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.555.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.237.797.019,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.625.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.544.500.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.403.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.285.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.312.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.403.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.285.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.312.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	50.951.835.958,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.967.850.964,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.698.439.505,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	89.795.307,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.182.511,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.389.069.232,00	

5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	157.491.375,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	608.912.366,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.292.625,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.814.248.174,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	124.252.140,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	67.609.629,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	138.055.093,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	403.756,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	31.037,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.693.719.453,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	103.998.969,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	51.341.733,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.329.224,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	154.026.671,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	10.376.344,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	2.944.740.412,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14.487.016.092,00	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	863.835.000,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	762.310.123,00	
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	57.894.214,00	
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	3.678.811.000,00	
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	582.500.000,00	
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	251.537.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.580.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.647.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.733.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	180.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.02.3.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.3.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat		
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	6.000.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	9.357.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.170.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	43.740.000,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.280.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	411.764.500,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.203.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	407.200,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	924.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.600.000,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.261.449.400,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.020.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	278.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	278.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	278.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	278.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	278.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	278.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.599.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	152.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	369.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	687.852.000,00	

5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	362.563.500,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.100.000,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.479.484.500,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.890.000.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	480.000.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.175.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.610.000.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.010.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	720.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	378.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.550.000,00	

5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	246.270.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.3.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.750.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.3.02.0047 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	299.200.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.374.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.300.000,00	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	84.000.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	70.000.000,00	

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	140.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	616.876.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	307.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	92.750.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.750.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		

5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.392.646.170,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	637.481.023,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	76.440.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	143.214.750,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	395.503.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	805.412.412,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.014.655,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	162.832,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	615.729.669,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	17.742.165,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	53.227.171,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	1.050.315.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.049.365.499,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	297.307.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.456.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	88.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.884.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		

5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	646.134.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	137.680.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	221.793.500,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	54.680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.252.500,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran		
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.044.000,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	31.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.547.550.000,00	

5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	114.397.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	126.018.900,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	81.255.000,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	102.599.600,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	50.961.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.075.000,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran		
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	26.103.500,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.986.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.316.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.548.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	48.966.000,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	19.083.400,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran		
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	283.435.200,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	23.650.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.613.400,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.127.800,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	148.741.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.410.800,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	85.904.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran		
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	61.226.000,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	27.977.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	38.280.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	356.264.600,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		

5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	211.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.244.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	128.108.200,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	43.185.200,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	26.610.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	99.631.000,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran		
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	33.974.600,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	68.490.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.078.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	240.000.000,00	

5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	120.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	564.704.000,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	149.296.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.855.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.130.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.372.200,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	195.200.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	200.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.300.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	43.200.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	372.592.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.327.257.068,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	446.832.049,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	18.522.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.299.500,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	377.275.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	650.152.188,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.722.245,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	167.771,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	430.282.625,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.784.928,00	

5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	38.356.328,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	785.788.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.072.950.747,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	224.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	29.352.400,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.867.600,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.323.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.000.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	60.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	152.460.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	37.600.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Rawat Inap Waghete		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.100.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.004.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.434.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	509.150.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	92.200.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	288.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.047.260.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Damabagata		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.870.300,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	528.110.500,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.520.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.173.530.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Kokobaya		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.015.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.211.400,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.030.400,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	384.636.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	88.200.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	168.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.230.640.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Edarotali		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.733.700,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	514.550.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000,00	
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	192.500.000,00	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.151.850.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Rawat Inap Ayatei		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.823.800,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	571.550.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	289.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	959.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Gakokebo		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.246.800,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000,00	
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	241.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.247.700.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Tenedagi		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.370.800,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	412.550.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	192.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	801.410.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Wagomani		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.080.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	464.410.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	190.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	661.458.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Bouwobado		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.915.800,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	388.865.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	192.000.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.351.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Kampiraya		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.060.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	499.650.000,00	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	840.470.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.496.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.140.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.993.364.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi		

5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku		
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	26.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi		
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor		
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	24.000.000,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.184.300,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.450.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi		
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.287.005.000,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.868.800,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.660.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan		
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	50.895.471.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.654.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	355.640.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan		
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	74.223.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan		
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.824.605.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	720.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	280.000.000,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		

5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.255.559.474,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	243.264.332,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.331.500,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	133.990.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	284.136.594,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.963.065,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.042,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	200.951.161,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.413.290,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.239.987,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	316.932.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.832.905.880,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	94.447.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	189.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.151.156,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	108.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.308.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.827.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.325.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.328.700,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		

5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	33.373.971.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.725.000.000,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas		
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	8.393.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	588.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	122.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
Unit Organisasi	: 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	995.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.090.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.265.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.735.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.090.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.925.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.927.200,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.251.072.800,00	
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.328.490.744,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117.379.559,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	56.742.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.806.900,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.351.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	140.472.024,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.530.085,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.019,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	125.722.247,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.188.342,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.565.084,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	187.131.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.667.084.907,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	58.065.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	75.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.937.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.189.100,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.374.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.236.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.672.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.390.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	252.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.594.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	82.545.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.000.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.060.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	232.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	639.300.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.226.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	74.757.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.241.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	302.775.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.550.874.460,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137.138.446,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	43.218.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.000.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	109.074.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	194.075.280,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.731.735,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.631,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	146.159.645,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.734.168,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.202.458,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	219.030.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.134.334.993,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	68.355.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	77.000.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	173.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	237.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	225.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.236.000.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.212.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		

5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	995.788.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.007.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.398.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.595.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	275.000.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	168.828.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	77.971.800,00	

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	116.300.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.600.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	901.872.259,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	104.069.789,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	63.419.016,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.194.023,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.679.320,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	102.770.323,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.084.157,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.423,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85.199.543,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.855.034,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		

5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.565.157,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	97.320.401,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.517.295.428,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	27.100.462,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.340.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	316.935.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	540.000.000,00	

5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0001 Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.416.482.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu		
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.620.000.000,00	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	9.000.000.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.200.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.800.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.400.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.605.026.850,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	163.297.184,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.908.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.204.200,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.498.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	181.136.928,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.047.590,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.667,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	154.430.255,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.852.135,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.556.199,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	229.687.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.011.329.600,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	63.945.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.338.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.921.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.898.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	384.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	70.493.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	518.609.308,00	
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	725.655.840,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi		
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	56.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA		
Unit Organisasi	: 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu		

5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	950.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.290.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.110.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.200.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.700.000,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.422.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.948.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	122.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	100.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.730.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.128.044.235,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137.780.076,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	50.490.481,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.244.511,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.683.887,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	134.635.530,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.882.471,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.738,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	91.205.132,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.320.698,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.962.173,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	119.378.183,00	

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.448.710.903,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	32.403.867,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.230.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.800.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	61.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	285.820.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.674.645.304,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	396.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.650.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.500.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.352.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	204.590.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.050.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.700.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	128.004.000,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41.154.000,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.252.604.640,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.970.242,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.058.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.204.200,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.634.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	111.593.286,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.237.500,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.698,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	125.840.100,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.006.253,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		

5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.018.744,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	171.255.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.981.140.340,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	46.305.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.839.200,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.889.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.381.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.632.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.100.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.423.200,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi		
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	36.498.600,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	402.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	30.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	134.870.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN		
Unit Organisasi	: 2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	676.300.000,00	
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	758.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	908.100,00	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	999.091.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	999.999.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	597.653.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	467.445.000,00	
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	941.795.484,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	109.857.672,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	64.680.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.572.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	110.142.837,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.668.600,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.950,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	86.037.709,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.260.287,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.780.948,00	

5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	129.580.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.804.845.061,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	36.015.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.055.400,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.157.600,00	

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.895.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.632.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	154.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.840.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	204.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	624.000.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	108.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	52.500.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	343.750.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	100.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.750.000,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	168.828.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	77.971.800,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.300.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	173.932.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	80.430.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	144.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		

5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.037.500,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi		
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah		
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.000.000.000,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.542.964.038,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165.451.837,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	89.670.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.938.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	77.910.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	181.975.122,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		

5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.732.015,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.063,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	150.387.946,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.703.106,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.109.334,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	208.813.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.026.395.102,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	63.945.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	322.225.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	197.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	295.935.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	936.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	660.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.090.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.450.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.800.000,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0003 Fasilitas Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	254.128.100,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	256.090.800,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.100.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.090.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	113.491.100,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.000.000,00	

5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.100.000,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.840.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.030.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	306.348.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	565.782.000,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.250.912.670,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.041.498,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.846.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.806.900,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.227.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	145.556.460,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.057.945,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.360,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	120.363.624,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.002.196,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.006.587,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	177.135.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.158.274.921,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	49.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.724.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	271.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.546.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	346.160.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		

5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	228.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	264.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG		
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG		
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.531.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.830.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.939.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.620.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	174.410.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	374.420.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	126.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.435.000.000,00	
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	140.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	148.800.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	200.000.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	670.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	597.750.000,00	
Kegiatan	: 2.13.04.3.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.3.01.0026 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.531.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.830.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.939.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	121.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.700.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.531.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.830.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.939.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.422.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.660.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	108.968.000,00	

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.600.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	47.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.550.000,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.395.332.840,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	179.442.075,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.270.611,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.036.241,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.016.973,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	178.383.963,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.205.432,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.049,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	124.103.634,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		

5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.867.013,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.601.106,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	151.436.619,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.854.026.227,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	40.899.313,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.257.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.743.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	79.842.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	95.157.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	871.979.409,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	252.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.234.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	174.410.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	281.016.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.600.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.625.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	330.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.405.440.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.000.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.025.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.974.400,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.077.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.923.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	169.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	327.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.520.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	353.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.970.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	62.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		

Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.680.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184.920.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	268.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	97.760.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	196.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	61.044.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	900.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan		
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	268.650.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	82.857.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	799.000,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	24.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	180.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	743.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.500.000,00	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.360.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.700.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	390.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	250.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.500.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.202.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	348.798.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.100.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.150.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	148.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.350.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah DASHAT di Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.268.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	156.082.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.350.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.700.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	43.384.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.114.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	77.752.500,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.100.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.012.000,00	
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi		
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	39.487.500,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		

Indikator Keluaran	: Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	228.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	305.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	273.855.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	342.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.840.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		
Indikator Keluaran	: Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	334.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	999.666.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.732.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu		
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat		
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	993.268.000,00	
Program	: 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.15.04.3.03 Pembangunan Bandar Udara		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.04.3.03.0003 Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara		
Indikator Keluaran	: Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.724.997.050,00	

Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.162.171.122,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	138.041.879,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	115.321.500,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.583.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	135.683.205,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.048.725,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.272,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	113.366.339,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.789.207,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.367.666,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	156.775.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.798.650.208,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	42.262.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	165.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	35.335.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.228.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.895.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.632.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	306.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.400.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	420.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	148.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.906.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.900.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.490.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.300.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.339.200,00	

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	172.712.800,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.076.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	128.400.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	312.480.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	67.500.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	513.492.000,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.306.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.902.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.306.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.902.000,00	

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.306.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.902.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.792.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.408.541.839,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	150.825.367,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	61.191.520,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.436.383,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	69.544.824,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	168.956.652,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.313.240,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.500,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	116.002.547,00	

5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.894.548,00	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8.683.681,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	157.268.295,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.053.900.503,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	45.661.622,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.640.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	240.290.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.281.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193.290.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	492.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	180.500.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI		
Unit Organisasi	: 2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI		
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	355.200,00	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.099.743.800,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	750.000.000,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.188.405.918,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	109.124.891,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.838.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.922.500,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.216.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	121.316.748,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.599.315,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.785,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	119.123.108,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.852.138,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.556.517,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	168.241.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.069.970.206,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	47.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.600.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.465.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.580.300,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.853.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.750.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215.270.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	540.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	60.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	94.500.000,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	84.461.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	950.000.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	320.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.499.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.685.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.303.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.752.000,00	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	112.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.760.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.316.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.445.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.033.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.220.000,00	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	27.486.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.000.000,00	

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	112.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.750.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.250.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.3.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140.300,00	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	299.999.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	599.860.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		

5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.243.141.935,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.417.117,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	63.140.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.924.750,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	132.618.108,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.449.015,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.966,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	128.936.935,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.983.580,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.950.698,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	170.047.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.076.137.552,00	

5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	48.072.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.040.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.089.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	494.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.998.200,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.001.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.990.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	276.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.805.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.227.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.317.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.650.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.410.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.731.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.039.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00	

5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	52.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.020.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.993.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.054.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.828.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105.125.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	997.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	365.190.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.157.712.405,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	116.635.910,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	101.885.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.596.500,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.117.250,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.302.960,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.733.270,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.357,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	114.944.516,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.780.872,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.342.731,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	162.513.750,00	

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.865.969.450,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	42.332.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.788.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.040.200,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.228.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.612.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi		
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	48.668.200,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	88.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	528.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	156.470.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	80.430.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	149.650.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.875.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.184.129.569,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	124.059.122,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	78.638.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.346.350,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.081.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.894.386,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.576.465,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.564,00	

5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	114.610.494,00	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.841.888,00	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8.525.722,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	158.065.250,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.805.229.936,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	44.843.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.420.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.509.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.019.200,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.689.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186.362.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	199.968.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	540.196.352,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi		
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	22.000.000,00	

Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	72.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	296.825.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.900.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156.700.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.350.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian		
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan		
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	2.382.625.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	634.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	499.366.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	196.530.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	182.900.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.900.000,00	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	303.120.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.350.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		

5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	1.500.000.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.466.275.020,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	138.683.681,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.908.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.204.200,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	72.912.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	166.581.282,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.753.515,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.623,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	143.353.086,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.519.151,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.557.231,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	215.355.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.885.824.780,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	60.637.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.332.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.668.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.446.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.554.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	271.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	144.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	200.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	780.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.758.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan		
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.494.462.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	300.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	511.997.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	999.739.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	260.500,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	710.000,00	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	136.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.790.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	792.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.235.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.642.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	430.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189.980.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar		
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat		
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	349.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat		
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	98.100.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.982.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.470.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.958.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	125.040.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.700.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	547.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	83.250.000,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.650.742.473,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		

5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	181.082.756,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	59.303.805,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.520.151,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.500.289,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	207.797.015,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.654.960,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.732,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	145.674.970,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.401.438,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.204.361,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	181.813.880,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.306.742.955,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	51.883.275,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.234.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.272.300,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.660.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.415.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	234.640.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.277.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	264.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
Unit Organisasi	: 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.148.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.072.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000,00	

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.400.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.03.3.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.3.01.0003 Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	605.700,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu		
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	299.394.300,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	400.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.486.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.054.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.809.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	186.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.680.500,00	

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.108.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi		
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	30.399.500,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.712.000,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.403.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	610.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.385.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.3.01.0007 Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.3.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.452.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	695.547.500,00	
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.247.284.082,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	108.815.778,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	114.000.375,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.025.450,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	57.608.875,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.872.003,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.250.810,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.084,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	120.640.096,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.578.114,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.734.330,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	156.184.375,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.179.609.276,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	44.375.625,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.230.000,00	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	188.282.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.718.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	249.444.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	66.800.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.277.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.868.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.282.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.024.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.074.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	552.000.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	499.751.593,00	
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	17.500.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.403.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	610.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.385.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	116.940.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.300.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.720.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.780.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	275.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.545.440.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.540.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.360.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	221.600.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	89.614.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	157.850.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	246.856.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	55.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	111.986.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	170.050.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	271.043.200,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	22.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	165.710.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.370.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	288.040.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	530.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	28.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.213.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.565.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.111.222.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.410.574.486,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	530.244.523,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		

5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	392.269.500,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	292.089.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	606.583.740,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	72.679.740,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	111.632,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	494.752.489,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.987.524,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	38.962.629,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	745.290.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.147.685.232,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	219.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	127.380.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	154.780.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258.456.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.800.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	451.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.040.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	141.460.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	275.500.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	18.800.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.080.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.470.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	395.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	116.940.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	92.540.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	226.800.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	92.500.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.820.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	793.355.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	464.645.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.380.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.991.484.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	749.958.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.497.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.995.502.800,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.544.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.928.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.801.820.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	598.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.388.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	978.611.760,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH		
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.380.000,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH		
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.174.800,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH		
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.684.000,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH		
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.623.390,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH		
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.909.809,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH		
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	80.832,00	

5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH		
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.370.432,00	
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH		
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.114.192,00	
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH		
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.342.576,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH		
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	300.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	79.576.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	900.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	770.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	78.160.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	635.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	825.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	461.840.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.092.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.582.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.426.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	819.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	10.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.750.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0001 KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.121.100,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.732.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.618.400,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139.450.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	48.900.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	299.678.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.658.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.532.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.060.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.700.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	190.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.180.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.766.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.312.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.942.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.770.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.766.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.300.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.864.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.529.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.635.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.085.200,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.950.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0002 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		

5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.850.000.000,00	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.676.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.130.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.080.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	89.980.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.350.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215.784.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0003 KEPALA BAGIAN HUKUM		
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.755.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.833.000,00	

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.041.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.816.500,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.550.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.400.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.250.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	22.190.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	122.414.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.052.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.730.400,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.585.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	375.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	121.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.550.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	11.965.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.342.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		

Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.348.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	278.400,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.173.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.450.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	160.000.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat		
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.473.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.726.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.821.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	339.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	279.980.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0005 KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominformasi, Perhubungan, Statistik, Persandian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.017.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.168.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.360.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.848.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.398.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42.913.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.248.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	228.048.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0006 KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.500.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.354.900,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.725.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.888.100,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.000.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.712.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	109.080.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	19.200.000,00	
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	651.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	345.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	83.087.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.327.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.964.500,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	58.840.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.520.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	88.200.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	72.000.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	43.800.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	386.615.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.500.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	189.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.146.500,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0007 KEPALA BAGIAN UMUM		
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.658.300,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.370.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.182.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	237.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.133.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.173.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	66.830.400,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.200.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	11.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.658.300,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.370.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.182.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.890.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	205.296.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0008 KEPALA BAGIAN ORGANISASI		
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.505.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.840.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.232.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	28.480.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	301.536.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.216.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	98.551.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71.840.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	92.800.000,00	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH		
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0009 KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL		
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.670.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.953.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.050.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.064.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.756.000,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi		
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	48.668.200,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		

5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	44.838.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.444.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	209.300.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.256.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.944.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.395.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.636.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	433.625.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.532.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	149.818.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	975.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.300.900,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	548.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	143.300.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	548.050.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	130.362.100,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.096.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	282.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.717.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	282.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.717.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	282.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.717.500.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	275.759.000,00	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	924.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.250.300,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	108.625.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	525.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.068.125.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	347.427.100,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.948.800,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	712.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.038.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	80.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	500.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.471.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.944.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.395.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.637.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	433.625.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitas Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.603.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.970.000,00	

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.727.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.338.225.000,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.241.048.970,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.950.442,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.147.500,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	64.753.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	140.704.578,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.386.835,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.668,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	114.594.526,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.978.543,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.935.586,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	177.502.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.653.854.998,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	49.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.221.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.655.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	376.974.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147.178.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.375.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121.560.000,00	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.150.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	86.944.000,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	212.731.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	602.318.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	402.906.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	663.736.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	311.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.279.688.755,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		

5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	817.477.272,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas		
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.056.992.030,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	840.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD		
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	563.010.000,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD		
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.821.400,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD		
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.000.000,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD		
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.301.000,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD		
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.364.500,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD		
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	65.863.350,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD		
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	7.033.950,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		

5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.562.000.000,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD		
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.023.750.000,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	796.689.660,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD		
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	16.682.106,00	
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.351.224,00	
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1.689.030,00	
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.040.000.000,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD		
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1.140.000.000,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD		
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	375.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	185.004.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	164.996.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000.000,00	
BELANJA DAERAH			

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.015.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.625.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.333.400,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.400.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	355.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.910.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	150.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	239.716.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.471.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.877.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.300.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	52.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	371.680.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.915.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.721.400,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.018.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	154.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197.145.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.042.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.727.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.230.800,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.600.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	120.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	574.200.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	214.202.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	131.205.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.087.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	628.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.550.000,00	

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.187.356.000,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.586.362.554,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	172.063.118,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.427.500,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	67.767.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	172.397.484,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.663.735,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.828,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	144.509.548,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.807.271,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.421.856,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		

5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	223.293.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.310.105.034,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	51.817.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.828.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.172.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	214.678.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	744.522.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	600.000.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	292.500.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.800.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.584.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	181.616.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	510.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.800.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.584.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	166.616.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.800.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.584.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	166.616.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.800.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.584.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	141.616.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.800.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.584.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	181.616.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	510.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.800.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.584.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	141.616.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.949.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.026.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	387.249.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	554.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	100.800.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	312.976.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.813.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.584.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	204.114.400,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	56.000.000,00	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	156.488.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.945.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.440.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.930.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.685.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.940.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.440.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.920.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.800.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.900.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	117.200.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	220.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.940.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.360.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	197.250.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.130.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.720.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.900.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	101.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.940.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.060.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.300.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	174.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	124.800.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.213.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.642.200,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.225.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.419.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.476.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.307.800,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.136.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.929.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	136.480.200,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.934.400,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170.656.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.884.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	181.500.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.728.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	66.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	120.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173.888.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.109.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42.789.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.149.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.952.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.650.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	98.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.100.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.605.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	154.112.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	88.378.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.904.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.399.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		

5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	450.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	317.976.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	212.625.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.838.200,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.264.200,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.509.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.280.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.500.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	44.590.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.018.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.818.900,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.586.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.049.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.550.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	18.935.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.818.900,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.586.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.049.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.550.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	18.935.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.686.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.195.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.482.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.750.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	151.000.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	66.885.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.396.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.724.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.647.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.500.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	120.000.000,00	
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	86.000.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	100.100.000,00	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah		
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	96.000.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	87.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	467.631.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	558.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.200.000,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	51.195.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.583.300,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.586.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.020.200,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	765.000,00	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.550.000,00	
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	232.605.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	18.935.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.469.900,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.457.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.482.600,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.500.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	44.590.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.785.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.195.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	69.309.400,00	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	73.360.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.400.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.800.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.612.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	169.598.300,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.612.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	169.598.300,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.612.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	169.598.300,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.612.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	169.598.300,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.612.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	169.598.300,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.612.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	169.598.300,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.780.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	11.586.388.271,00	

5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	293.686.539,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.326.094,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.031.813,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	147.068.281,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.217.706.505,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.718.393,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.238,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.872.310.634,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.009.638,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.029.095,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	347.489.063,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.457.797.286,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	96.960.156,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	218.592.600,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	146.285.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	205.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	174.130.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.440.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	166.350.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.000.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.646.000,00	

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.355.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	183.998.400,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	176.691.400,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	224.007.200,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	29.300.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.385.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.440.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.920.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	278.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	124.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140.055.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.043.100,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.355.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	560.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	580.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.780.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.743.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	55.976.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.500.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	55.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00	

5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	114.486.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.980.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.393.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	25.200.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365.940.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	551.686.100,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	198.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	531.592.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.499.824.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	8.027.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	393.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.499.607.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.507.560.500,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	499.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	680.000.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.868.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	750.000.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi		
5.1.02.02.02.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	670.134.000,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	221.367.048,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	276.708.804,00	
5.1.02.02.02.0012	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	240.000.000,00	
5.1.02.02.02.0013	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	163.200.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	734.370.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	65.622.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	202.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	744.595.136,00	
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.961.798.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0001 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	63.756.350.000,00	
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.419.276.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga		

5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.047.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.885.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	51.644.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	385.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.700.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.724.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	357.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.777.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.540.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.863.000,00	

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	84.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	340.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.070.070.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.294.371.302,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.412.638,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.760.640,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.874.770,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.042.026,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	145.580.753,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.402.085,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		

5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.666,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	122.629.168,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.661.810,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.985.447,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	142.137.047,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.071.464.117,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	39.290.781,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.179.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.991.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.406.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	329.424.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.000.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	300.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	102.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.400,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.591.590,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.287.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.504.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.355.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.160.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	78.360.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	525.784.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.430.400,00	

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.766.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.191.600,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.300.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	122.312.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.414.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.766.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.763.600,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.460.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	28.380.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.416.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.013.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.440.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.317.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.600.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.280.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.967.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.766.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.787.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.880.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	48.900.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.200.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.822.148.749,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	156.956.945,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.664.186,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.408.757,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.853.642,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	179.253.637,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.706.747,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.972,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	148.855.204,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.745.170,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.235.587,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	206.784.903,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.070.499.860,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	53.342.516,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.017.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.440.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.373.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.140.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.600.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.280.000,00	

Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	153.900.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	474.576.000,00	

Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	140.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.576.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	853.424.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	276.473.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.541.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	252.413.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	105.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	597.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	106.525.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	299.280.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	20.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.213.768.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.471.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.250.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	111.417.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.600.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.250.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.480.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	321.532.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT		

Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	296.375.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.612.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	129.375.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	177.900.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.632.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	36.750.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176.508.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	82.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	9.375.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219.930.000,00	

Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	13.875.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.543.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	27.750.000,00	
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	18.375.000,00	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.192.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	77.400.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	372.124.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.650.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	5.100.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.880.000,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.075.261.239,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.370.521,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	52.920.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	69.980.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.815.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	159.627.300,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.681.830,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.231,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85.681.890,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.180.933,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.542.843,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	191.761.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.674.774.701,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	56.595.000,00	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	883.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	55.609.800,00	
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	382.900.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.293.523.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	246.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.874.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	88.254.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.838.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201.355.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	30.375.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	696.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	556.000.000,00	
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	439.582.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.981.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar		
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu		
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	58.338.300,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.143.909.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.020.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	45.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	621.900.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN		
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.196.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.892.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.361.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.596.700,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.703.300,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.800.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.900.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.470.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.930.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.470.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.930.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	806.691.370,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83.027.041,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	23.814.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.000.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.496.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.272.228,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.016.840,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		

5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.023,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	82.125.236,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.948.073,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.844.220,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	113.925.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	972.300.100,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	33.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.576.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.534.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.592.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.298.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	180.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		

Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.920.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.480.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.420.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.480.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		

5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.850.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.150.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	835.396.942,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.124.490,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15.876.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.481.900,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.423.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.272.228,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.000.000,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.362,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.507.224,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.016.958,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.050.902,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	115.248.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.006.110.080,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	30.135.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	242.085.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.335.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.400.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	96.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.222.400,00	

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.892.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.385.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.196.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.892.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.361.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.550.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.105.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.787.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.108.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	621.645.360,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	60.870.495,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.938.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.351.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.395.524,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.804,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	65.151.188,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		

5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.491.947,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.475.856,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	88.200.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	921.690.020,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	27.195.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.720.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas		
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	97.280.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	144.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO		

Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.329.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.892.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.279.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.170.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.617.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.212.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	514.719.030,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	50.663.050,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.938.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.733.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.326.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.457.172,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.672,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	58.060.231,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		

5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.235.315,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.705.973,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	72.765.000,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	820.470.020,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	20.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.863.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	136.422.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.915.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.800.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	120.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA		
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.196.400,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.892.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.361.600,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.392.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.784.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.723.200,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.100.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	446.796.504,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.178.870,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	26.460.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.179.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.518.820,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.218.100,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.599,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.177.285,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.072.336,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.216.948,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	62.548.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	820.470.140,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	17.272.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.446.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	52.553.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		

5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199.350.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	480.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Unit Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.463.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.270.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.517.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	850.000.000,00	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.463.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.270.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.367.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	213.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.463.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.270.000,00	

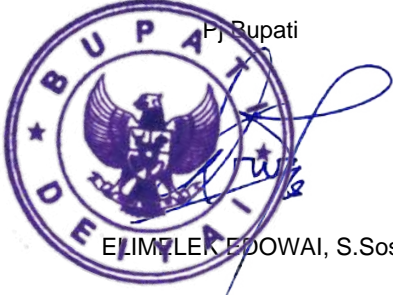
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.517.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	624.196.104,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	54.744.035,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.581.500,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.204.200,00	

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.901.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.658.374,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.334.835,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.716,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	70.808.286,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.498.062,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.494.231,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)		
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	87.685.500,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.255.694.924,00	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	25.357.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.264.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.745.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	511.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197.690.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	408.000.000,00	

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati

 ELIMPLEK EDOWAI, S.Sos



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 15 TAHUN 2024

Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	WAGHETE	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
2	KOPASUS	Kabupaten Deiyai	50.000.000,00
3	Satgas TNI	Waghete	200.000.000,00
4	FKDM	Waghete	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			450.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
5	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	Waghete	150.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			150.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
6	KODIM	Waghete	250.000.000,00
7	KODAM	Waghete	50.000.000,00
8	KOREM	Waghete	50.000.000,00
9	KAMTIBMAS POLRES	Kabupaten Deiyai	500.000.000,00
10	Partai Politik	Deiyai	150.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.000.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Pelaksanaan tugas Paskibraka		
11	Panitia Seleksi Paskibraka	Waghete	400.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			400.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			2.200.000.000,00
	DINAS KESEHATAN		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		
12	BIAYA STUDI BIDAN DAN PERAWAT DARI D3 LANJUT S-1	Kabupaten Deiyai	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KESEHATAN			1.000.000.000,00
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
13	KNPI Deiyai	Waghete	500.000.000,00
14	PEMUDAN TERMINAL WAGHETE	Waghete	200.000.000,00
15	PEMUDA PEMANTAU MIRAS DEIYAI	Waghete	250.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			950.000.000,00
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		
16	PRAMUKA	Waghete	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		
17	KONI	Waghete	1.500.000.000,00
18	PERSATUAN SEPAK BOLA DEIYAI (PERSEDI)	Waghete	450.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.950.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			3.100.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DINAS PENDIDIKAN			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
19	Yayasan YPPGI	Waghete 1	200.000.000,00
20	Yayasan YPPK	Waghete 1	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			400.000.000,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD			
21	TK KOMUGAI WAGHETE	Tigi	52.800.000,00
22	TK Pelangi Kasih	TK Pelangi Kasih	46.800.000,00
23	TK NEGERI TOUPODE YABA	Tigi	38.400.000,00
24	TK PAUD Goomoti Gerbang Mas Edagotadi	Tigi Timur	4.800.000,00
25	TK ANTIOKHIA YPPGI WAGHETE	Tigi	34.800.000,00
26	TK WOKEBADA WAGOMANI	Tigi Barat	16.800.000,00
27	TK YAPIS ASH SIDDIQ	Tigi	81.600.000,00
28	TK PAUD PUMAIYE	Tigi Barat	49.200.000,00
29	TK YPPGI Gideon Yeuwo Timepa	TK YPPGI Gideon Yeuwo Timepa	403.648.000,00
30	TK Negeri Pancaran Kasih Enaimo Tadauto	TK Negeri Pancaran Kasih Enaimo Tadauto	6.000.000,00
31	TK Dimipi Pagouya	Tigi Barat	56.400.000,00
32	TK PLAY GROUP GADABI YINUDOBA	Tigi Barat	57.600.000,00
33	TK PAUD Negeri Mamukai	TK PAUD Negeri Mamukai	66.000.000,00
34	SPS Tugu-Tugu	tigi bar	160.800.000,00
35	KELOMPOK BERMIAN (KB) YUPIWO	Tigi Timur	32.400.000,00
36	KB Kabomaki YPPGI Puteyato	Tigi Timur	105.600.000,00
37	KB EDOUTOU	Tigi Barat	290.400.000,00
38	KB ST Veronika Damabagata	Tigi Timur	66.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
39	KB Eyai	Eyai	54.000.000,00
40	KB AYAKEBO	Tigi Barat	97.200.000,00
41	PAUD KB AMOBAGATA	Tigi	66.000.000,00
42	KB Yabadimi	Tigi	25.200.000,00
43	KB Ayatei	Ayatei	86.400.000,00
44	KB St. Theresia Widimei	KB St. Theresia Widimei	145.200.000,00
45	PAUD KB Emudai Yomeni	Tigi	61.200.000,00
46	PAUD Mentari Timur	Tigi Timur	46.800.000,00
47	KB BON Meiyepa	Tigi Barat	133.200.000,00
48	KB Kigou	Tigi	418.800.000,00
49	KB Betani	KB Betani	15.600.000,00
50	TK Negeri Waitakotu	TK Negeri Waitakotu	32.400.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.752.048.000,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
51	SKB Melati	-	24.600.000,00
52	PKBM OKOMOKEBO	-	18.800.000,00
53	PKBM YUPIWO	-	59.800.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			103.200.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
54	SD YPPK Ayatei	-	811.580.000,00
55	SD YPPK Waghete	-	605.880.000,00
56	SD YPPGI BOMOU	-	301.070.000,00
57	SD YPPK KIGOU	-	656.370.000,00
58	SD YPPK Egepakigida	-	467.500.000,00
59	SD YPPK Yagu	-	703.120.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
60	SD YPPGI Yaba	-	396.440.000,00
61	SD YPPGI Idego	-	324.224.000,00
62	SD YPPK Mugouda	-	686.290.000,00
63	SD YPPK Maatadi	-	787.270.000,00
64	SD YPPK Edagotadi	-	280.500.000,00
65	SD YAPIS Ash Siddiq Waghete	-	443.190.000,00
66	SD YPPGI Gakokebo II	-	710.600.000,00
67	SD YPPGI Tenedagi	-	467.500.000,00
68	SD YPPK Meyepa	-	553.520.000,00
69	SD YPPGI Ibodiyo	-	495.550.000,00
70	SD YPPK Wagomani	-	645.150.000,00
71	SD YPPK Widimei	-	673.200.000,00
72	SD YPPGI Demago	-	680.680.000,00
73	SD YPPGI Onageidapa	-	460.020.000,00
74	SD YPPGI Ikiyauwo	-	239.360.000,00
75	SD YPPGI Waghete	-	617.100.000,00
76	SD YPPK St. Teresia Diyai	-	762.960.000,00
77	SD YPPGI ABEGA	-	372.130.000,00
78	SD YPPGI Motano	-	402.050.000,00
79	SD YPPGI Widuwakia	-	512.380.000,00
80	SD Negeri Mudetadi	-	102.850.000,00
81	SD YPPK DIYOUTO	-	379.610.000,00
82	SD YPPGI Dokotopa	-	656.370.000,00
83	SD YPPGI Onago	-	387.090.000,00
84	SD YPPK Yaba	-	688.160.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
85	SD YPPK Yinudoba	-	759.220.000,00
86	SD YPPGI Waneuwogi	-	212.176.000,00
87	SD YPPGI Bomou III	-	246.840.000,00
88	SD YPPK Damabagata	-	422.620.000,00
89	SD YPPGI Gakokebo I	-	433.840.000,00
90	SD YPPK Kogemani	-	589.050.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			18.933.460.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
91	SMA YPPGI Waghete	-	833.160.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			833.160.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
92	SMKS YPPSA Kesehatan Deiyai	-	212.940.000,00
93	SMKS YPPK Santo Yohanes Pembaptis GAIYABI Deiyai	-	57.460.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			270.400.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
94	SMP YPPK Waghete	-	764.240.000,00
95	SMP YPPGI Bomou	-	650.070.000,00
96	SMP YPPGI Gakokebo	-	472.990.000,00
97	SMP YPPK EDAGOTADI	-	563.860.000,00
98	SMP Katolik Diyai	-	486.970.000,00
99	SMP YPPGI Tenedagi	-	778.220.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			3.716.350.000,00
Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota			
100	YAYASAN PENDIDIKAN GENIUS	JLN. BINONG RAYA NO 1 LIPPO KARAWACI TANGERANG 15810- BANTEN; INDONESIA	5.000.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			5.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN			32.008.618.000,00
	DINAS PERTANIAN		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
101	Kelompok Tani OAP	Waghete	600.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			600.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PERTANIAN			600.000.000,00
	DINAS SOSIAL		
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		
102	Panitia Pembangunan Gereja Jemaat Golgota Dedoba Kebo	WIDIMEI	700.000.000,00
103	Panitia Pembangunan Gereja Khatolik Digibagata	Digibagata	200.000.000,00
104	Panitia Pembangunan Gereja Khatolik Kogemani	Kogemani	900.000.000,00
105	Panitia Gerja Khtolik Widimie	Waghete II	1.000.000.000,00
106	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Apeyai	Waghete I	300.000.000,00
107	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Atou Kampung Komauto	Komauto	100.000.000,00
108	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Bagumoma	Kokobaya	300.000.000,00
109	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Idego	Tenedagi	100.000.000,00
110	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Kopai I	Kopai I	100.000.000,00
111	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Mogodagi	Yinudoba	100.000.000,00
112	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Mudetadi	Tenedagi	100.000.000,00
113	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Tugu-tugu	Idego	500.000.000,00
114	Panitia Pembangunan Gereja Kingmi Uwe Onagei	Uwe Onagei	100.000.000,00
115	Panitia Pembangunan Lanjutan Aula Gereja Kingmi Gakokebo	Gakokebo	100.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
116	Panitia Pembangunan Lanjutan Aula Gereja Kingmi Onago	Onago	719.000.000,00
117	Panitia Pembangunan Lanjutan Aula Gereja Katholik Egepakigitadi	Watiyai	100.000.000,00
118	Panitia Pembangunan Lanjutan Gereja Katholik Watiyai	Watiyai	300.000.000,00
119	Panitia Pembangunan Lanjutan Gereja Kingmi Dakebo	Dakebo	100.000.000,00
120	Panitia Pembangunan Lanjutan Gereja Kingmi Idayodagi	Idayodagi	100.000.000,00
121	Panitia Pembangunan Rumah Pastori Jemaat Rehobot Piyamatadi Kelasis Tigi Utara Kordinator Deiyai	ibodiyo	997.482.000,00
122	Panitia Pembangunan Gereja Betel Gakekebo	Gakekebo	1.000.000.000,00
123	Panitia Pembangunan Gereja Bethani Bomou I	Bomou I	1.000.000.000,00
124	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Zion Ugiya	Ugiya	500.000.000,00
125	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Getsemani Piyake Dimi	Digibagata	200.000.000,00
126	Panitia Pembangunan Rumah Pastori Jemaat Sion Onageipada	Damabagata	300.000.000,00
127	Panitia Pembangunan Gereja Katolik STASI ST Simon Petrus Udaugida	Udaugida	300.000.000,00
128	Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat GBI Anugera Waghete	Waghete I	100.000.000,00
129	Panitia Pembangunan Gereja Katholik Santa Clara Dagokebo	Dagokebo	300.000.000,00
130	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat EL-SYHADAI Waghete	Waghete I	100.000.000,00
131	Pembangunan Gedung Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia (GPSDI) Jemaat Imanuel Waghete	Waghete I	100.000.000,00
132	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Imanuel Ayatei Klasis Anugrah Tigi Barat	Ayatei	300.000.000,00
133	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Jemaat KEFAS Mugouda Waghete	Waghete I	100.000.000,00
134	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Pos P.I Zaitun Doutou Begapa Kampung Amago Distrik Tigi	Amago	300.000.000,00
135	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Jemaat EBENHEIZER Okomotadi Kelasis Tigi Kordinator Deiyai	Okomotadi	300.000.000,00
136	Panitia Pembangunan Rumah Pastori Klasis Yatamo Apogo	Watiyai	300.000.000,00
137	Panitia Pembangunan Rumah Pastori Kelasis Debei Kordinator Deiyai	Debei	300.000.000,00
138	Panitia Pembangunan Aula Gereja Bethesda Tenedagi	Tenedagi	1.000.000.000,00
139	Panitia Pembangunan Lanjutan Gereja Kingmi Odekotu	ODEKOTU	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			14.416.482.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS SOSIAL			14.416.482.000,00
	KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT		
	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
140	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waghete	750.000.000,00
141	Penyelenggaraan Papua Yout Day	Waghete	500.000.000,00
142	Penyelenggaraan Pesparani	Waghete	1.000.000.000,00
143	Honor bagi Hamba- Hamba Tuhan (Pendeta, Pastor dan Pengurus Gereja) Kab. Deiyai	Kab. Deiyai	6.000.000.000,00
144	HIBAH PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH KODIM	Waghete	750.000.000,00
145	Honor Kepala Suku Se Kab. Deiyai	Waghete	500.000.000,00
146	GEREJA BETHESDA TENEDAGI	Tenedagi	500.000.000,00
147	YAYASAN NOKEN WAGHETE	Waghete	100.000.000,00
148	GEREJA GKI KALISEMEN SP2 NABIRE	SP2 Nabire	150.000.000,00
149	TK. ADIYAKSA NABIRE	Nabire	250.000.000,00
150	TK. KODIM NABIRE	Nabire	250.000.000,00
151	GEREJA GKI YUDEA WAGHETE	Waghete	250.000.000,00
152	GEREJA MESBAH ODEKOTU	Digikotu	500.000.000,00
153	MESJID WAGHETE	Waghete	500.000.000,00
154	GEREJA-GEREJA KLASIS DEBEI	Waghete	250.000.000,00
155	GEREJA KATOLIK UDAUGI	Udaugida	100.000.000,00
156	GEREJA KATOLIK EDARITALI	Edagotadi	150.000.000,00
157	GEREJA DIYOUTO ONAGEIDAPA	Uwe Onagei	150.000.000,00
158	GEREJA GKIP IBODIYO	Waghete	150.000.000,00
159	GEREJA PASTORAN PAROKI WAGHETE	Waghete	250.000.000,00
160	GEREJA GBI FOGZ WAGHETE	Waghete	100.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
161	GEREJA GKIP KEFAS WAGHETE	Waghete	150.000.000,00
162	GEREJA GKIP DIYAI	Diyai	150.000.000,00
163	GEREJA GKIP KINOUMANI	Kogemani	150.000.000,00
164	GEREJA KATOLIK AYATEI	Ayatei	200.000.000,00
165	GEREJA GKIP TUGU-TUGU	Waghete	200.000.000,00
166	Hibah Uang untuk Pembangunan tambahan ruang kerja Bag OPS POLRES Deiyai	Waghete	250.000.000,00
167	Hibah Uang untuk Pembangunan Barak POLSEK Tigi POLRES Deiyai	Waghete	250.000.000,00
168	RADIO PUBLIK KEBADA FM DEIYAI	WAGHETE	100.000.000,00
169	BPS PANIAI (DEIYAI DALAM ANGKA)	Paniai - Madi	200.000.000,00
170	DARMA WANITA	Waghete	300.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			15.100.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT			15.100.000.000,00
	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN		
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
171	Masyarakat OAP Distrik Tigi	Tigi	1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN			1.000.000.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH		
	Fasilitasi Keprotokolan		
172	Panitia Hari-Hari Besar Nasional	Waghete	500.000.000,00
173	Panitia HUT RI	Waghete	1.250.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.750.000.000,00
	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota		

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
174	Bantuan Biaya Masuk Perguruan Tinggi Kedokteran bagi OAP	Waghete	6.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			6.000.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH			7.750.000.000,00

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



ELIMELEK EDOWAI, S.Sos



Hibah Berupa Barang / Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



FLIMELEK EDOWAI, S.Sos



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 15 TAHUN 2024

Tanggal : 20 Desember 2024

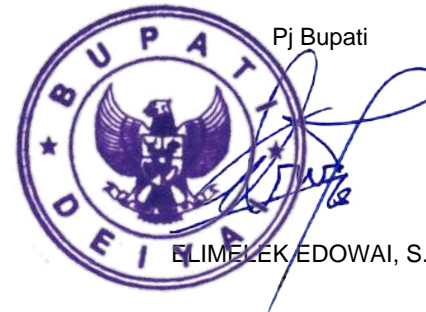
KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota		
1			1.000.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.000.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			1.000.000.000,00
	DINAS SOSIAL		
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		
2	Bantuan Sosial Individu	Distrik Kampiraya	1.500.000.000,00
3	Bantuan Sosial Individu	Distrik Tigi	2.000.000.000,00
4	Bantuan Sosial Individu	Distrik Tigi Barat	2.000.000.000,00
5	Bantuan Sosial Individu	Distrik Tigi Timur	1.120.000.000,00
6	Bantuan Sosial Individu	Distrik Bouwobado	1.000.000.000,00
7	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat		2.000.000.000,00
8	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Distrik Tigi Barat	2.000.000.000,00
9	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Distrik Tigi Timur	1.500.000.000,00
10	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Distrik Bouwobado	1.500.000.000,00
11	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Distrik Kampiraya	2.000.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			16.620.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS SOSIAL			16.620.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	DINAS TENAGA KERJA		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
12	Pelatihan Montir Servis Mobil bagi OAP di BLK Jayapura	DEIYAI	350.000.000,00
13	Pelatihan Servis Komputer dan Laptop	DEIYAI	300.000.000,00
14	Pelatihan Montir Servis Motor bagi OAP ke Nabire	DEIYAI	300.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			950.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD DINAS TENAGA KERJA			950.000.000,00

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



ELIMELEK EDOWAI, S.Sos



Bantuan Sosial Berupa Barang / Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG				

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



FLIMELEK EDOWAI, S.Sos



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



ELMELEK EDOWAI, S.Sos



Bantuan Keuangan Khusus

Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Amago		790.094.247,00
2	Atouda		1.019.024.781,00
3	Bamou II		761.759.020,00
4	Bomau I		739.454.595,00
5	Bomou III		793.743.221,00
6	Buwoudimi		787.986.410,00
7	Ibodiyo		786.149.343,00
8	Idege		785.199.883,00
9	Ikiyawo		1.011.438.101,00
10	Motano		772.552.062,00
11	Mugouda		795.581.885,00
12	Okomakebo		795.397.629,00
13	Okomotadi		798.340.932,00
14	Oneibo		937.181.694,00
15	Peku		793.631.014,00
16	Ugiya		772.901.967,00
17	Waghete I		899.134.783,00
18	Waghete II		811.858.706,00
19	Yaba		761.955.230,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
20	Yaba II		783.132.307,00
21	Bagou		712.567.954,00
22	Bagou II		731.834.762,00
23	Bagumoma		733.384.087,00
24	Dagokebo		735.633.343,00
25	Dakebo		734.518.074,00
26	Damabagata		728.948.563,00
27	Edagotadi		732.160.504,00
28	Idayodagi		872.749.498,00
29	Ipoke		848.357.917,00
30	Kokobaya		1.036.586.637,00
31	Pekepa		872.825.381,00
32	Udaugida		715.188.943,00
33	Waitakotu		870.100.648,00
34	Watiyai		1.091.918.643,00
35	Ayatei		1.173.826.171,00
36	Demago		1.024.996.836,00
37	Digibagata		935.602.479,00
38	Digikotu		1.030.106.792,00
39	Diyai		736.263.156,00
40	Diyai II		742.709.308,00
41	Epanai		899.643.208,00
42	Gakokebo		1.068.026.600,00
43	Jinidaba		994.465.338,00
44	Kogemani		736.282.742,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
45	Maatadi		1.038.560.177,00
46	Meyepa		731.286.190,00
47	Obai		741.628.179,00
48	Onago		733.764.315,00
49	Onago II		737.028.346,00
50	Piyekedimi		935.087.318,00
51	Tenedagi		734.817.370,00
52	Wagomani		1.143.618.515,00
53	Widimei		749.990.117,00
54	Widuwakiya		939.993.339,00
55	Yagu		712.664.037,00
56	Yipai		864.278.457,00
57	Diita		1.266.161.314,00
58	Kopai I		955.231.893,00
59	Kopai II		1.045.011.679,00
60	Mudetadi		789.918.165,00
61	Woge		849.768.222,00
62	Yewadide		779.143.770,00
63	Idego		801.250.524,00
64	Komauto/Kapiraya		1.285.549.163,00
65	Mogodagi		802.177.131,00
66	Uwe Onagei		805.487.215,00
67	Yamouwitina		821.645.770,00
68	Amago		877.292.930,00
69	Atouda		1.131.489.362,00

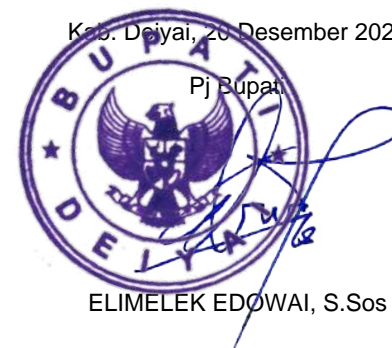
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
70	Bamou II		845.830.487,00
71	Bomau I		821.064.436,00
72	Bomou III		881.344.622,00
73	Buwoudimi		874.952.461,00
74	Ibodiyo		872.912.646,00
75	Idege		871.858.399,00
76	Ikiyawo		1.123.065.409,00
77	Motano		857.814.702,00
78	Mugouda		883.386.210,00
79	Okomakebo		883.181.619,00
80	Okomotadi		886.449.759,00
81	Oneibo		1.040.613.669,00
82	Peku		881.220.031,00
83	Ugiya		858.203.225,00
84	Waghete I		998.367.714,00
85	Waghete II		901.459.421,00
86	Yaba		846.048.352,00
87	Yaba II		869.562.635,00
88	Bagou		791.210.454,00
89	Bagou II		812.603.641,00
90	Bagumoma		814.323.957,00
91	Dagokebo		816.821.452,00
92	Dakebo		815.583.096,00
93	Damabagata		809.398.907,00
94	Edagotadi		812.965.334,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
95	Idayodagi		969.070.420,00
96	Ipoke		941.986.864,00
97	Kokobaya		1.150.989.430,00
98	Pekepa		969.154.678,00
99	Udaugida		794.120.707,00
100	Waitakotu		966.129.230,00
101	Watiyai		1.212.428.148,00
102	Ayatei		1.303.375.394,00
103	Demago		1.138.120.522,00
104	Digibagata		1.038.860.165,00
105	Digikotu		1.143.794.438,00
106	Diyai		817.520.775,00
107	Diyai II		824.678.355,00
108	Epanai		998.932.251,00
109	Gakokebo		1.185.899.255,00
110	Jinidaba		1.104.219.418,00
111	Kogemani		817.542.522,00
112	Maatadi		1.153.180.779,00
113	Meyepa		811.994.526,00
114	Obai		823.477.908,00
115	Onago		814.746.141,00
116	Onago II		818.370.415,00
117	Piyekedimi		1.038.288.148,00
118	Tenedagi		815.915.425,00
119	Wagomani		1.269.833.871,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
120	Widimei		832.762.711,00
121	Widuwakiya		1.043.735.621,00
122	Yagu		791.317.141,00
123	Yipai		959.664.473,00
124	Diita		1.405.901.096,00
125	Kopai I		1.060.655.977,00
126	Kopai II		1.160.344.301,00
127	Mudetadi		877.097.414,00
128	Woge		943.552.817,00
129	Yewadide		865.133.904,00
130	Idego		889.680.467,00
131	Komauto/Kapiraya		1.427.428.679,00
132	Mogodagi		890.709.311,00
133	Uwe Onagei		894.384.740,00
134	Yamouwitina		912.326.633,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			121.175.626.600,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			121.175.626.600,00

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



ELIMELEK EDOWAI, S.Sos



hasil pajak kepada Kabupaten

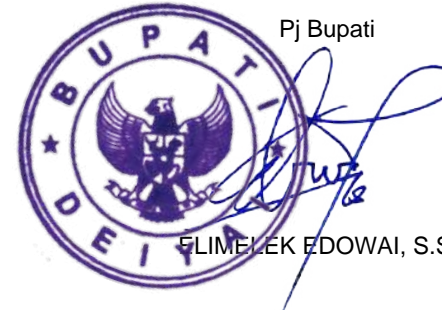
Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



FLIMELEK EDOWAI, S.Sos



hasil pajak kepada Kota

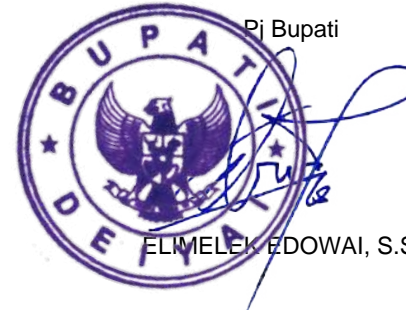
Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 15 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



ELMELEK EDOWAI, S.Sos



hasil pajak kepada Desa

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 15 TAHUN 2024

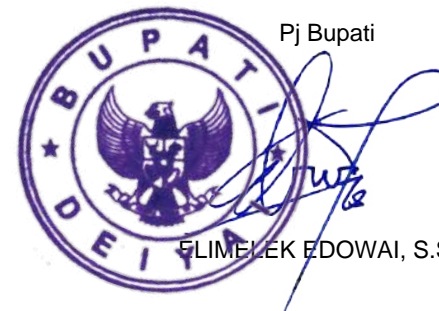
Tanggal : 20 Desember 2024

KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG			

Kab. Deiyai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



FLIMELEK EDOWAI, S.Sos

KABUPATEN DEIYAI

**Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	29.579.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.600.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	2.910.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	12.470.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Peneadaan Barang dan Jasa (UKPRJ)	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	13.600.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Peneadaan Barang dan Jasa (UKPRJ)	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	10.200.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	550.879.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	27.500.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	24.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	44.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	55.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	1.025.262.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	1.031.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	2.560.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	73.759.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	2.400.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	90.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	13.750.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	7.500.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	64.400.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	90.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	900.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	38.045.500
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	20.690.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	49.044.500
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.200.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	75.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	35.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	13.500.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	51.520.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.3.06.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	1.920.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.3.06.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	30.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.3.06.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	36.800.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.07 Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP	1.01.02.3.07.0004 Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	240.000.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	1.01.02.3.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	5.625.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	1.01.02.3.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	3.740.720.000
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	1.01.02.3.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	303.655.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.170.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	3.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	105.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.505.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.3.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	197.750.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.3.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	52.250.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.3.02.0047 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	100.400.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.3.02.0047 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	100.400.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.3.02.0047 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	149.600.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.3.02.0047 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	149.600.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	200.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	49.500.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	6.864.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	240.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	120.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	3.905.600
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	22.100.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	12.973.994.400
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	1.785.600
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	13.260.000
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	11.984.954.400
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	1.824.605.000
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	4.927.200
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	2.251.072.800
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	4.212.000
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5.2.04.02.04.0007 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	995.788.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	5.1.05.03.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14.416.482.000
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	950.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.077.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	6.923.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	140.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	252.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	7.520.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	142.250.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	250.230.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	12.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	150.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	138.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	34.680.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	80.400.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	184.920.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	97.760.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	196.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	61.044.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	22.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	700.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.750.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	900.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	46.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5.2.05.02.02.0003 Belanja Modal Barang Kerajinan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	268.650.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jearinnya	5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	4.380.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jearinnya	5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	78.477.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jearinnya	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	799.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	24.600.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	180.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	743.580.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	19.500.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	21.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	225.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	34.500.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.202.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	348.798.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	23.100.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	60.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	74.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	4.900.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejariannya	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	138.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	65.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	50.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	25.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	60.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	28.350.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	43.384.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.114.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	77.752.500
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	45.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	15.100.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	6.150.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	46.000.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	25.012.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IUPPKA)	5.2.02.14.02.0003 Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	39.487.500
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	305.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	273.855.000
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	25.840.000
2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	908.100
2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	999.091.900
2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	999.999.800

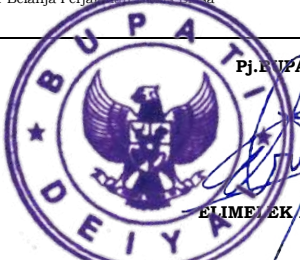
SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	200
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	1.000.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	6.840.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	21.030.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	306.348.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	565.782.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	334.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	999.666.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	2.169.600
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	2.169.600
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	86.356.400
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	86.356.400
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	538.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	538.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	64.200.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	64.200.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	156.240.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	156.240.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	33.750.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	33.750.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	256.746.000
2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi	256.746.000
2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERJINAN DAN KOPERASI	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	355.200
2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERJINAN DAN KOPERASI	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.099.743.800

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	320.000
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	1.499.680.000
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.3.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	140.300
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.3.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	299.999.700
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.3.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	599.860.000
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	997.000
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	365.190.000
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	780.000
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	4.758.000
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.494.462.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	634.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	499.366.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.2.04.02.05.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.500.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	300.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	511.997.600
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	2.400
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	999.739.500
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	260.500
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	710.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	136.500.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	62.790.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	792.400
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.235.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.642.600
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	430.000

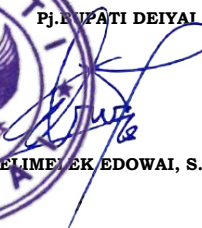
SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	123.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	189.980.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	349.920.000
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	600.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	62.148.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	4.072.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	480.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.500.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	90.400.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.600.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15.800.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	30.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	92.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.3.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.3.01.0003 Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	605.700
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.3.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.3.01.0003 Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.3.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.3.01.0003 Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	299.394.300
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	400.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	33.486.400
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.054.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14.809.600
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.200.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	45.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15.800.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	186.650.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0007 Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditasi bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	400.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0007 Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditasi bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	400.000.000
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	4.452.500
3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	695.547.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	1.01.02.3.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	6.000.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0002 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan	7.500.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0004 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	62.015.600
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	14.625.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	53.333.400
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	8.400.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	60.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	175.900.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	60.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	60.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	42.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	15.700.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	15.700.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	26.910.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	50.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	50.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	50.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	14.600.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA	SUMBER DANA	PAGU
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	574.200.000
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	14.476.200
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	68.307.800
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	31.136.000
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	45.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	30.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	311.080.000



Pj. BUPATI DEIYAI



ELIMELEK EDOWAI, S.Sos



Lampiran VIII : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 15 TAHUN 2024

Tanggal : 20 Desember 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI			
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;			
TAHUN ANGGARAN 2025			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4

Kab. Deiyai,

 **BUPATI DEIYAI**


ELMELIK EDOWAI, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2 NIHIL	3	4


BUPATI DEIYAI
[Signature]
ELIMLEK EDOWAI, S.Sos

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	300.733.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	180.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	142.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.357.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.170.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	43.740.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.280.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	890.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.824.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	366.350.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	42.700.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.203.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	407.200

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.014.655
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	162.832
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	615.729.669
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.742.165
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	53.227.171
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.050.315.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.049.365.499
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	297.307.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	68.456.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	88.660.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	142.884.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	646.134.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	137.680.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	221.793.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	54.680.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.252.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3.044.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	31.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	38.356.328
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	785.788.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.072.950.747
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	224.910.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.459.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.893.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.898.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.969.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.541.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.782.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.000.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	152.460.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	37.600.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Rawat Inap Waghete	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.100.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.540.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	96.827.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	225.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	244.325.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.328.700
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.200.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.498.028.350
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.875.942.950
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.725.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.393.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	588.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	122.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	995.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.090.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.265.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.150.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.735.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.090.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.925.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.250.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dana Bagi Hasil (DBH)	25.000.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	4.927.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	2.251.072.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.328.490.744
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	117.379.559
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	56.742.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.806.900
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	78.351.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	140.472.024
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.530.085

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	61.034.326
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	85.125.319
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.734.168
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.202.458
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	219.030.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.134.334.993
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	68.355.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	77.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	173.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	237.600.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	225.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	225.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	62.400.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.020.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	216.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	4.212.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	995.788.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.007.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.398.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Dana Alokasi Umum (DAU)	14.595.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	97.320.401
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.517.295.428
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.100.462
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.340.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.660.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.125.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.215.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	287.720.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.940.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	48.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	540.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.463.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Dana Bagi Hasil (DBH)	400.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.463.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.270.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	90.367.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	213.900.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	55.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	150.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	200.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	200.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.463.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.270.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	41.517.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	162.750.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	55.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	200.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	624.196.104
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.744.035
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	53.581.500
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.204.200
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.901.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.658.374
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.334.835
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.716

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.744.435
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.063.851
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.498.062
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.494.231
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	87.685.500
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.255.694.924
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.357.500
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.264.800
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.745.200
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	511.300.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	197.690.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.05.8.01.0.00.03.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	408.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14.416.482.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.620.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	9.000.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.200.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.800.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Dana Alokasi Umum (DAU)	64.600.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.490.481
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.244.511
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.683.887
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	134.635.530
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.882.471
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.738
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	91.205.132
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.320.698
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.962.173
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	119.378.183
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.448.710.903
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	32.403.867
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.230.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.050.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	91.800.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	61.100.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	285.820.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.674.645.304
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	396.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	25.200.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.889.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	47.381.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.632.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	47.816.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	151.100.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.423.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.498.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.550.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	402.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	30.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	134.870.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	40.200.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	30.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	30.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	15.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.900.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.400.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.280.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	33.120.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.300.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12.800.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	18.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	46.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	130.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	43.384.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembanguan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	342.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	676.300.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	758.600.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	908.100
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	999.091.900
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	999.999.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	597.653.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	467.445.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	941.795.484
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	109.857.672
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	64.680.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.572.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	110.142.837
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.668.600

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.950
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	86.037.709
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.260.287
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.780.948
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	129.580.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.804.845.061
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.015.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	120.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.055.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.157.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	46.895.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.632.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	53.270.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	154.100.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.840.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	204.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.050.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	624.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.7.01.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	108.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	144.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.037.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	1.000.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.542.964.038
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	165.451.837
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	89.670.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.938.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	77.910.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	181.975.122
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.732.015
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.063
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.387.946
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.703.106
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.109.334
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	208.813.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.026.395.102
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	63.945.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	322.225.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	197.840.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.3.01 Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.3.01.0026 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Dana Bagi Hasil (DBH)	25.939.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.3.01 Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.3.01.0026 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.400.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.3.01 Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.3.01.0026 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Dana Bagi Hasil (DBH)	121.100.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.3.01 Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.3.01.0026 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Dana Bagi Hasil (DBH)	67.500.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.3.01 Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.3.01.0026 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Dana Bagi Hasil (DBH)	79.700.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	18.531.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	28.830.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17.939.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	105.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	79.700.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	94.200.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.395.332.840
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	179.442.075
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	85.270.611
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.036.241
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	63.016.973
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	178.383.963
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.205.432
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.049
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	57.443.694
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	66.659.940
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.867.013
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.601.106
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	151.436.619
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.854.026.227
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.899.313
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	34.257.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.743.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	79.842.700

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	250.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	95.157.300
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	871.979.409
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	24.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	228.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	334.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan	999.666.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.732.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dana Alokasi Umum (DAU)	993.268.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.03 Pembangunan Bandar Udara	2.15.04.3.03.0003 Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.724.997.050
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.162.171.122
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	138.041.879
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	115.321.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	48.583.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	135.683.205
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.048.725
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.272
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	113.366.339
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.789.207
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.367.666
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	156.775.500

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.798.650.208
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.262.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	165.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.335.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.228.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	46.895.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.632.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.540.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	306.950.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	41.400.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	25.020.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	420.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	135.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Dana Bagi Hasil (DBH)	148.590.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.906.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.900.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.490.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	52.500.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	21.600.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	37.281.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	225.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	193.290.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	180.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	168.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	228.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	180.500.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	355.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.099.743.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	750.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.188.405.918
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	109.124.891
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	110.838.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.922.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	48.216.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	121.316.748

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.2.18.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	82.689.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	950.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	320.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	1.499.680.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga yang Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.685.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	12.303.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	25.752.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	20.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	47.900.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	64.600.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	10.800.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	69.960.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.950.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.316.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	9.445.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	982.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.307.156
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.983.580
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.950.698
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	170.047.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.076.137.552
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	48.072.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	24.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.040.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.089.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	494.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.998.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.001.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.590.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	47.400.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.260.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	96.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	108.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.805.200

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	48.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	72.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	296.825.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	114.900.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	225.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	156.700.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17.300.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.350.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.382.625.300
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	634.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	499.366.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	196.530.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	182.900.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	114.900.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	303.120.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	153.900.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17.300.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.350.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.500.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.466.275.020
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	138.683.681
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	82.908.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.204.200
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	72.912.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	166.581.282
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.753.515

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	23.623
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	143.353.086
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.519.151
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.557.231
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	215.355.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.885.824.780
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.637.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	73.332.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.668.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.446.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	151.554.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	271.999.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	36.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	144.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	300.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	511.997.600

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	5.700.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	547.500.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	83.250.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.650.742.473
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	181.082.756
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	59.303.805
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.520.151
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	84.500.289
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	207.797.015
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.654.960
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.732
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	145.674.970
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.401.438
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.204.361
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	181.813.880
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.306.742.955
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	51.883.275
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.234.300
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.272.300
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.660.800

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.415.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	44.640.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	190.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.277.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.500.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	264.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	48.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	62.148.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	4.072.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	480.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.500.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	90.400.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.600.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15.800.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	30.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	92.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.3.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.3.01.0003 Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	605.700

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.399.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.712.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.403.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	610.800
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.385.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.600.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0007 Fasilitas pendampingan akses permodalan/perkreditasi bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	400.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0007 Fasilitas pendampingan akses permodalan/perkreditasi bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	400.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0008 Fasilitas bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	4.452.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.3.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.3.01.0008 Fasilitas bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	695.547.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.247.284.082
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	108.815.778
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	114.000.375
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.025.450
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	57.608.875
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	130.872.003
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.250.810
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.084
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	120.640.096

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.074.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	552.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.500.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	499.751.593
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.13 Penataan Organisasi	3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.403.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.13 Penataan Organisasi	3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	610.800
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.13 Penataan Organisasi	3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.385.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.13 Penataan Organisasi	3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.13 Penataan Organisasi	3.31.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.600.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	1.01.02.3.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	6.000.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	120.234.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	174.410.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	281.016.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	12.600.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.625.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	330.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	51.300.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	645.440.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.760.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	116.940.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	104.300.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	150.720.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.400.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.780.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	275.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	116.940.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	92.540.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	226.800.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.400.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	460.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	92.500.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.820.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	600.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Bagi Hasil (DBH)	500.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	793.355.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	464.645.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.200.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)	500.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)	820.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)	800.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	60.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	802.800.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	705.024.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	483.660.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	500.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	958.800.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.541.024.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.027.400.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	393.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.499.607.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.507.560.500
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	250.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	499.999.500
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	30.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.868.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	670.134.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	221.367.048
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	276.708.804
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	240.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	163.200.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	250.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	200.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	200.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	750.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	734.370.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.622.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	55.991.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.406.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)	140.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)	150.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	281.704.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	47.720.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	120.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	300.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	60.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	102.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.400
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.400.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02 KEUANGAN	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	28.591.590
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Bagi Hasil (DBH)	73.287.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.504.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.355.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Bagi Hasil (DBH)	20.160.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Bagi Hasil (DBH)	150.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Bagi Hasil (DBH)	28.800.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	15.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	180.280.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	153.900.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	46.100.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	125.424.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	145.776.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	226.384.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	140.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	48.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	48.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	56.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.576.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	797.424.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	276.473.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.541.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dana Bagi Hasil (DBH)	36.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dana Bagi Hasil (DBH)	44.530.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.075.261.239
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	140.370.521
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	52.920.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	69.980.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	56.815.500
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	159.627.300
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.681.830
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.231
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	85.681.890
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.180.933
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.542.843
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	191.761.500
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.674.774.701
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	56.595.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	883.800.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	30.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Bagi Hasil (DBH)	20.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Bagi Hasil (DBH)	55.609.800
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Bagi Hasil (DBH)	382.900.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.242.575.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Bagi Hasil (DBH)	50.948.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	246.480.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	55.874.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	88.254.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	62.838.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	13.200.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	390.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	201.355.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	30.375.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	696.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	556.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	700.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Dana Bagi Hasil (DBH)	439.582.800
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	55.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.981.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	200.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	58.338.300
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.143.909.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.020.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.950.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	621.900.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6.196.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.892.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.361.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	87.550.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.596.700
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.703.300
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.800.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	79.900.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	28.470.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.930.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.600.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	28.470.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	19.930.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.600.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	806.691.370
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	83.027.041
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	23.814.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.496.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.272.228
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.016.840
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.023
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	82.125.236
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.948.073
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.844.220
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	113.925.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	972.300.100
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.075.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	64.576.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	59.534.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	36.592.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	89.298.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	180.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 DISTRIK TIGI	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	24.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	82.124.490
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.876.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.481.900
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	45.423.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.272.228
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.362
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	81.507.224
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.016.958
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.050.902
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	115.248.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.006.110.080
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.135.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	242.085.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.180.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	139.335.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.500.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.500.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	46.400.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	75.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	96.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 DISTRIK TIGI BARAT	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	42.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.222.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.892.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	31.385.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	112.500.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.196.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.892.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.361.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dana Alokasi Umum (DAU)	87.550.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.105.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.787.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	34.108.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	153.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	621.645.360
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	60.870.495
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.938.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.351.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	74.395.524
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.804
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	65.151.188
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.491.947
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.475.856
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	88.200.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	921.690.020
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	27.195.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	30.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	64.088.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	35.912.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	150.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.720.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	97.280.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	144.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 DISTRIK TIGI TIMUR	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6.329.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.892.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.279.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	87.500.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	30.170.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	64.617.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	5.212.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	514.719.030
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	50.663.050
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.938.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.733.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.326.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	61.457.172
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.672
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	58.060.231
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.235.315

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.705.973
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	72.765.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	820.470.020
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.580.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	12.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	61.863.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	136.422.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.915.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	300.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	46.800.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	72.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 DISTRIK BOUWOBADO	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	120.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	6.196.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.892.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.361.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	87.550.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	12.392.800
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.784.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.723.200

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	175.100.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	446.796.504
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.178.870
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.460.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	29.179.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	48.518.820
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.218.100
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.599
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	55.177.285
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.072.336
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.216.948
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	62.548.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	820.470.140
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.272.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	18.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	12.000.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	47.446.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	52.553.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.650.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	199.350.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01 KECAMATAN	7.01.0.00.0.00.05.0000 DISTRIK KAPIRAYA	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	480.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI			
PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP			
TAHUN ANGGARAN 2025			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	5.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.000.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupate	5.000.000.000	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.000.000.000	Kab. Deiyai


Pj BUPATI DEIYAI
ELIMELEK EDOWAI, S.Sos

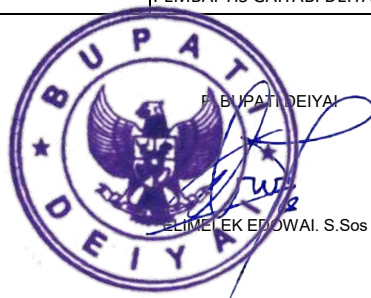
PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS
PER SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 15 TAHUN 2024

Tanggal : 20 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Lokasi	Jumlah
1	2	4	3
1.01.4.01.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN		37.095.252.060
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		37.095.252.060
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		37.095.252.060
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		26.078.828.993
		- SD INPRES OBAI	652.630.000
		- SD INPRES DAKEBO	295.460.000
		- SD INPRES WAGHETE	164.560.000
		- SD INPRES PUDU	444.242.469
		- SD INPRES KOMAUTO	478.381.291
		- SD INPRES KOPAI	125.290.000
		- SD INPRES UWOTADI	442.822.291
		- SD INPRES BOMOU	472.525.710
		- SD INPRES DAGOKEBO	361.012.174
		- SD INPRES WATIYAI	317.111.489
		- SD INPRES KOKOBAYA	332.236.667
		- SD INPRES WAITA KOTU	304.575.326
		- SD INPRES DIGIBAGATA	193.383.636
		- SD INPRES ATOOU	308.241.426
Kode Rekening	Uraian	Lokasi	Jumlah
1	2	4	3
		- SD INPRES ENAIMO TADAUTO	832.150.000
		- SD INPRES OKOMOKEBO	277.883.721
		- SD Inpres Kampiraya	249.621.834
		- SD NEGERI WAGHETE	164.560.000
		- SD Inpres Mogodagi	556.963.634
		- SD INPRES PUDIDIYAI	274.567.265
		- SD YPPK KOGEMANI	589.050.000
		- SD YPPGI WIDUWAKIA	512.380.000
		- SD YPPK DIYOUTO	379.610.000
		- SD YPPGI DOKOTOPA	656.370.000
		- SD YPPGI ONAGO	387.090.000
		- SD YPPK YABA	688.160.000
		- SD YPPK YINUDOBA	759.220.000
		- SD YPPGI WANEUWOGI	212.176.000
		- SD YPPGI BOMOU III	246.840.000
		- SD YPPK DAMABAGATA	422.620.000
		- SD YPPK ST. TERESIA DIYAI	762.960.000
		- SD YPPGI GAKOKEBO I	433.840.000
		- SD YPPGI ABEGA	372.130.000
		- SD YPPGI MOTANO	402.050.000
		- SD YPPK AYATEI	811.580.000
		- SD YPPK WAGHETE	605.880.000
		- SD YPPGI BOMOU	301.070.000
		- SD YPPK KIGOU	656.370.000
		- SD YPPK EGEPAKIGIDA	467.500.000
Kode Rekening	Uraian	Lokasi	Jumlah
1	2	4	3
		- SD YPPK YAGU	703.120.000
		- SD YPPGI YABA	396.440.000
		- SD YPPGI IDEGO	324.224.000
		- SD YPPK MUGOUDA	686.290.000
		- SD YPPK MAATADI	787.270.000
		- SD YPPK EDAGOTADI	280.500.000
		- SD YAPIS ASH SIDDIQ WAGHETE	443.190.000
		- SD YPPGI GAKOKEBO II	710.600.000
		- SD YPPGI TENEDAGI	467.500.000
		- SD YPPK MEYEPA	553.520.000
		- SD YPPGI Ibodiyo	495.550.000
		- SD YPPK WAGOMANI	645.150.000
		- SD YPPK WIDIMEI	673.200.000
		- SD YPPGI DEMAGO	680.680.000
		- SD YPPGI ONAGEIDAPA	460.020.000
		- SD YPPGI IKIYAUWO	239.360.000
		- SD YPPGI WAGHETE	617.100.000

1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		6.779.262.011
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		6.779.262.011
		- SMP NEGERI 1 TIGI	924.691.726
		- SMP NEGERI 1 TIGI TIMUR	705.270.285
		- SMP NEGERI 1 TIGI BARAT	545.220.000
		- SMP NEGERI 2 TIGI BARAT	887.730.000
		- SMP YPPGI BOMOU	650.070.000
Kode Rekening	Uraian	Lokasi	Jumlah
1	2	4	3
		- SMP YPPK WAGHETE	764.240.000
		- SMP YPPK EDAGOTADI	563.860.000
		- SMP YPPGI GAKOKEBO	472.990.000
		- SMP YPPGI TENEDAGI	778.220.000
		- SMP KATOLIK DEIYAI	486.970.000
1.01.02.3.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		2.971.587.072
1.01.02.3.05.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		2.971.587.072
		-SMA NEGERI 2 DEIYAI	693.676.665
		- SMA NEGERI 1 DEIYAI	1.444.750.407
		- SMA YPPGI WAGHETE	833.160.000
1.01.02.3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.265.573.984
1.01.02.3.06.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		1.265.573.984
		-SMK NEGERI 1 TEKNOLOGI DAN REKAYASA DEIYAI	995.173.984
		- SMKS YPPSA KESEHATAN DEIYAI	212.940.000
		- SMKS YPPK SANTO YOHANES PEMBAPTIS GAIYABI DEIYAI	57.460.000





KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI
BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN)
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN, BIDANG URUSAN, SKPD,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				343.439.393.523,00		323.278.059.523,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				47.150.500.919,00		28.241.166.919,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				47.150.500.919,00		28.241.166.919,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		35.676.248.900,00		18.761.148.900,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		32.821.000.900,00		18.761.148.900,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		7.453.000.900,00		7.453.000.900,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		7.453.000.900,00		7.453.000.900,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	100.000.000,00		100.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	736.984.300,00		736.984.300,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	468.297.000,00		468.297.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	1.503.336.400,00		1.503.336.400,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	120.720.000,00		120.720.000,00	
		5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	43.21	3.165.513.200,00		3.165.513.200,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	1.358.150.000,00		1.358.150.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	441.000.000,00		441.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	235.100.000,00		235.100.000,00	
		5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	40.00	17.280.000,00		17.280.000,00	
		5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	40.00	12.000.000,00		12.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	40.00	2.100.000.000,00		2.100.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	72.000.000,00		72.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	900.000.000,00		900.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	180.000.000,00		180.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32.73	84.190.000,00		54.190.000,00	
		5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	40.00	61.200.000,00		61.200.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	2.046.878.000,00		2.046.878.000,00	
		5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.00	180.000.000,00		180.000.000,00	
		5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	65.71	4.984.500.000,00		4.984.500.000,00	
		5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0	13.922.352.000,00		0,00	
		5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0	92.500.000,00		0,00	
		5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	0	15.000.000,00		0,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0	2.752.048.000,00		0,00	
		5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0	103.200.000,00		0,00	
		5.2	BELANJA MODAL		11.474.252.019,00		9.480.018.019,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.589.304.453,00		1.808.020.000,00	
		5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium		1.668.020.000,00		1.668.020.000,00	
		5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah		1.668.020.000,00		1.668.020.000,00	
		5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	40.00	1.570.082.000,00		1.570.082.000,00	
		5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	40.00	97.938.000,00		97.938.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	140.000.000,00		140.000.000,00	
		5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0	781.284.453,00		0,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	4.237.797.019,00		4.237.797.019,00	
		5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.00	1.680.000.000,00		1.680.000.000,00	
		5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.00	602.379.000,00		602.379.000,00	
		5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	100.00	1.124.262.000,00		1.124.262.000,00	
		5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	40.00	27.560.000,00		27.560.000,00	
		5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0	1.212.949.547,00		0,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.994.507.000,00		70.910.507.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN				36.873.401.500,00		36.831.401.500,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1	BELANJA OPERASI		25.691.747.500,00		25.649.747.500,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		25.691.747.500,00		25.649.747.500,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		9.647.457.500,00		9.647.457.500,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		9.647.457.500,00		9.647.457.500,00	
		5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40.00	731.592.000,00		731.592.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	7.280.000,00		7.280.000,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	774.328.000,00		774.328.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	173.759.400,00		173.759.400,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	89.067.200,00		89.067.200,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	642.897.000,00		642.897.000,00	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.00	40.600.000,00		40.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	40.00	3.740.933.900,00		3.740.933.900,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	1.471.500.000,00		1.471.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	307.500.000,00		307.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.00	1.668.000.000,00		1.668.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	155.450.000,00		155.450.000,00	
		5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	40.00	84.000.000,00		84.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	46.67	4.878.000.000,00		4.878.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	2.490.000.000,00		2.490.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	720.000.000,00		720.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	40.00	70.000.000,00		70.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	100.00	3.175.200.000,00		3.175.200.000,00	
		5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.00	45.000.000,00		45.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	40.00	292.000.000,00		292.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	4.092.640.000,00		4.092.640.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		11.181.654.000,00		11.181.654.000,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.178.020.000,00		1.178.020.000,00	
		5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		1.178.020.000,00		1.178.020.000,00	
		5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		1.178.020.000,00		1.178.020.000,00	
		5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	40.00	1.178.020.000,00		1.178.020.000,00	
		5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	100.00	646.134.000,00		646.134.000,00	
		5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	100.00	9.357.500.000,00		9.357.500.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA				16.664.000.000,00		16.622.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		14.982.908.900,00		14.940.908.900,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		14.982.908.900,00		14.940.908.900,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		4.906.266.900,00		4.906.266.900,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		4.624.508.200,00		4.624.508.200,00	
		5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40.00	459.439.500,00		459.439.500,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	152.460.000,00		152.460.000,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	279.591.300,00		279.591.300,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	67.855.800,00		67.855.800,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	27.130.000,00		27.130.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	72.048.000,00		72.048.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	8.400.000,00		8.400.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	196.064.000,00		196.064.000,00	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	40.00	2.410.800,00		2.410.800,00	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.00	216.125.000,00		216.125.000,00	
		5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	40.00	2.277.122.200,00		2.277.122.200,00	
		5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	40.00	470.661.600,00		470.661.600,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	195.200.000,00		195.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	200.000.000,00		200.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	40.00	281.758.700,00		281.758.700,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	30.300.000,00		30.300.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	4.950.000,00		4.950.000,00	
		5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	40.00	9.138.000.000,00		9.138.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	240.000.000,00		240.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	120.000.000,00		120.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	43.200.000,00		43.200.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.00	3.000.000,00		3.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	45.000.000,00		45.000.000,00	
		5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	40.00	37.600.000,00		37.600.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	372.592.000,00		372.592.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		1.681.091.100,00		1.681.091.100,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.681.091.100,00		1.681.091.100,00	
		5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	40.00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40.00	103.883.500,00		103.883.500,00	
		5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	40.00	6.075.000,00		6.075.000,00	
		5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	40.00	407.783.300,00		407.783.300,00	
		5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	40.00	163.349.300,00		163.349.300,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Rawat Inap Waghete				1.963.148.000,00		1.963.148.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.963.148.000,00		1.963.148.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.963.148.000,00		1.963.148.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		624.888.000,00		624.888.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		624.888.000,00		624.888.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	5.100.000,00		5.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	2.004.000,00		2.004.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	16.434.000,00		16.434.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	509.150.000,00		509.150.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	92.200.000,00		92.200.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	288.000.000,00		288.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	3.000.000,00		3.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.047.260.000,00		1.047.260.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Damabagata				1.879.880.800,00		1.879.880.800,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1	BELANJA OPERASI		1.879.880.800,00		1.879.880.800,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		553.830.800,00		553.830.800,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		553.830.800,00		553.830.800,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	2.250.000,00		2.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	10.870.300,00		10.870.300,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	528.110.500,00		528.110.500,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	12.600.000,00		12.600.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	150.000.000,00		150.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	2.520.000,00		2.520.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.173.530.000,00		1.173.530.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Kokobaya				1.906.732.800,00		1.906.732.800,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.906.732.800,00		1.906.732.800,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		506.092.800,00		506.092.800,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		506.092.800,00		506.092.800,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	3.015.000,00		3.015.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	7.211.400,00		7.211.400,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	23.030.400,00		23.030.400,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	384.636.000,00		384.636.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	88.200.000,00		88.200.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	168.000.000,00		168.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	2.000.000,00		2.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.230.640.000,00		1.230.640.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Edarotali				1.879.883.700,00		1.879.883.700,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.879.883.700,00		1.879.883.700,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		533.533.700,00		533.533.700,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		533.533.700,00		533.533.700,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	2.250.000,00		2.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	16.733.700,00		16.733.700,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	514.550.000,00		514.550.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	2.000.000,00		2.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	40.00	192.500.000,00		192.500.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.151.850.000,00		1.151.850.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Rawat Inap Ayatei				1.830.573.800,00		1.830.573.800,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.830.573.800,00		1.830.573.800,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		579.373.800,00		579.373.800,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		579.373.800,00		579.373.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	7.823.800,00		7.823.800,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	571.550.000,00		571.550.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	3.000.000,00		3.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	40.00	289.000.000,00		289.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	959.200.000,00		959.200.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Gakokebo				1.928.096.800,00		1.928.096.800,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.928.096.800,00		1.928.096.800,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		437.396.800,00		437.396.800,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		437.396.800,00		437.396.800,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	2.250.000,00		2.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	14.246.800,00		14.246.800,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	420.900.000,00		420.900.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	2.000.000,00		2.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	40.00	241.000.000,00		241.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.247.700.000,00		1.247.700.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Tenedagi				1.423.180.800,00		1.423.180.800,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.423.180.800,00		1.423.180.800,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		427.770.800,00		427.770.800,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		427.770.800,00		427.770.800,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	2.250.000,00		2.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	3.600.000,00		3.600.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	9.370.800,00		9.370.800,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	412.550.000,00		412.550.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	192.000.000,00		192.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	2.000.000,00		2.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	801.410.000,00		801.410.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Wagomani				1.343.948.000,00		1.343.948.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.343.948.000,00		1.343.948.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		486.490.000,00		486.490.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		486.490.000,00		486.490.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	22.080.000,00		22.080.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	464.410.000,00		464.410.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	190.000.000,00		190.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	6.000.000,00		6.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	661.458.000,00		661.458.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Bouwobado				1.958.480.800,00		1.958.480.800,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.958.480.800,00		1.958.480.800,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		412.280.800,00		412.280.800,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		412.280.800,00		412.280.800,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	1.500.000,00		1.500.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	21.915.800,00		21.915.800,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	388.865.000,00		388.865.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	192.000.000,00		192.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	3.000.000,00		3.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.351.200.000,00		1.351.200.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Kapiroaya				1.343.180.000,00		1.343.180.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.343.180.000,00		1.343.180.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		502.710.000,00		502.710.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		502.710.000,00		502.710.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	3.060.000,00		3.060.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	499.650.000,00		499.650.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	840.470.000,00		840.470.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				181.028.120.456,00		179.986.120.456,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				181.028.120.456,00		179.986.120.456,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.153.772.956,00		2.111.772.956,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		752.357.956,00		752.357.956,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		752.357.956,00		752.357.956,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	122.000.000,00		122.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	28.308.000,00		28.308.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	24.540.000,00		24.540.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	140.358.800,00		140.358.800,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	20.000.000,00		20.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	3.151.156,00		3.151.156,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	225.000.000,00		225.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.00	189.000.000,00		189.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	588.000.000,00		588.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0	1.000.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	747.415.000,00		747.415.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		177.874.347.500,00		177.874.347.500,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		108.000.000,00		108.000.000,00	
		5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		108.000.000,00		108.000.000,00	
		5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		108.000.000,00		108.000.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	108.000.000,00		108.000.000,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	33.373.971.300,00		33.373.971.300,00	
		5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.00	2.725.000.000,00		2.725.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	100.00	8.393.000.000,00		8.393.000.000,00	
		5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	100.00	125.119.402.200,00		125.119.402.200,00	
		5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	100.00	1.824.605.000,00		1.824.605.000,00	
		5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	100.00	3.287.005.000,00		3.287.005.000,00	
		5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	100.00	2.993.364.000,00		2.993.364.000,00	
		5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.00	26.000.000,00		26.000.000,00	
		5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	100.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				28.398.000.000,00		28.398.000.000,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				28.398.000.000,00		28.398.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		28.298.062.300,00		28.298.062.300,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		28.298.062.300,00		28.298.062.300,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		27.717.272.300,00		27.717.272.300,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		27.717.272.300,00		27.717.272.300,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	15.189.100,00		15.189.100,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	75.104.400,00		75.104.400,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	44.416.000,00		44.416.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	180.790.000,00		180.790.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	19.200.000,00		19.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.00	27.251.072.800,00		27.251.072.800,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	50.000.000,00		50.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	81.500.000,00		81.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	8.400.000,00		8.400.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	90.000.000,00		90.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	252.000.000,00		252.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	200.390.000,00		200.390.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		99.937.700,00		99.937.700,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		99.937.700,00		99.937.700,00	
		5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		99.937.700,00		99.937.700,00	
		5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		75.000.000,00		75.000.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	75.000.000,00		75.000.000,00	
		5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.00	24.937.700,00		24.937.700,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.182.000.000,00		13.098.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				9.778.000.000,00		9.736.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1	BELANJA OPERASI		9.778.000.000,00		9.736.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		9.778.000.000,00		9.736.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.495.525.000,00		1.495.525.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.495.525.000,00		1.495.525.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	85.821.000,00		85.821.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	330.303.000,00		330.303.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	288.841.000,00		288.841.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	18.060.000,00		18.060.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	547.500.000,00		547.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	225.000.000,00		225.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	7.236.000.000,00		7.236.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.004.475.000,00		1.004.475.000,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.404.000.000,00		3.362.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		2.408.212.000,00		2.366.212.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.300.377.000,00		1.300.377.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.300.377.000,00		1.300.377.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	54.000.000,00		54.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	221.175.200,00		221.175.200,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	135.029.800,00		135.029.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	38.932.000,00		38.932.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	8.940.000,00		8.940.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	21.000.000,00		21.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	280.000.000,00		280.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	541.300.000,00		541.300.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	17.300.000,00		17.300.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	48.000.000,00		48.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	540.000.000,00		540.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	436.535.000,00		436.535.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		995.788.000,00		995.788.000,00	
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		995.788.000,00		995.788.000,00	
		5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		995.788.000,00		995.788.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		995.788.000,00		995.788.000,00	
		5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	100.00	995.788.000,00		995.788.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				2.686.265.148,00		2.644.265.148,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL				2.686.265.148,00		2.644.265.148,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.386.000.000,00		1.344.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.386.000.000,00		1.344.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		568.652.000,00		568.652.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		568.652.000,00		568.652.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	70.493.000,00		70.493.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	39.338.000,00		39.338.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	62.100.000,00		62.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	62.921.000,00		62.921.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	233.800.000,00		233.800.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	100.000.000,00		100.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	66.200.000,00		66.200.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	36.000.000,00		36.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	384.000.000,00		384.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	20.250.000,00		20.250.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	244.898.000,00		244.898.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		1.300.265.148,00		1.300.265.148,00	
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.244.265.148,00		1.244.265.148,00	
		5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		1.244.265.148,00		1.244.265.148,00	
		5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		1.244.265.148,00		1.244.265.148,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	518.609.308,00		518.609.308,00	
		5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.00	725.655.840,00		725.655.840,00	
		5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	100.00	56.000.000,00		56.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				63.997.216.815,00		63.493.216.815,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.412.645.304,00		4.370.645.304,00	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA				4.412.645.304,00		4.370.645.304,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.738.000.000,00		1.696.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.738.000.000,00		1.696.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		714.950.000,00		714.950.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		714.950.000,00		714.950.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	117.942.000,00		117.942.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	105.160.000,00		105.160.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	49.148.000,00		49.148.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	25.200.000,00		25.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	234.300.000,00		234.300.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	183.200.000,00		183.200.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	166.800.000,00		166.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	396.000.000,00		396.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	418.250.000,00		418.250.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		2.674.645.304,00		2.674.645.304,00	
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.674.645.304,00		2.674.645.304,00	
		5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		2.674.645.304,00		2.674.645.304,00	
		5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		2.674.645.304,00		2.674.645.304,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	2.674.645.304,00		2.674.645.304,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.674.000.000,00		1.632.000.000,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				1.674.000.000,00		1.632.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.459.920.200,00		1.417.920.200,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.459.920.200,00		1.417.920.200,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		806.370.200,00		806.370.200,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		806.370.200,00		806.370.200,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	134.870.000,00		134.870.000,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	11.839.200,00		11.839.200,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	47.381.200,00		47.381.200,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	19.632.000,00		19.632.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	87.368.000,00		87.368.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	25.000.000,00		25.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	8.889.800,00		8.889.800,00	
		5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	40.00	204.590.000,00		204.590.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	266.800.000,00		266.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	30.700.000,00		30.700.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	12.800.000,00		12.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	402.000.000,00		402.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	8.550.000,00		8.550.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	127.500.000,00		127.500.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		214.079.800,00		214.079.800,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		214.079.800,00		214.079.800,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		177.581.200,00		177.581.200,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		177.581.200,00		177.581.200,00	
		5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	40.00	8.423.200,00		8.423.200,00	
		5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	40.00	128.004.000,00		128.004.000,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	41.154.000,00		41.154.000,00	
		5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	40.00	36.498.600,00		36.498.600,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				5.965.998.600,00		5.923.998.600,00	
2.09.7.01.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN				5.965.998.600,00		5.923.998.600,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		5.294.553.600,00		5.252.553.600,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		5.294.553.600,00		5.252.553.600,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01	Belanja Barang		4.587.663.600,00		4.587.663.600,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		4.587.663.600,00		4.587.663.600,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	108.000.000,00		108.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	40.00	1.676.299.800,00		1.676.299.800,00	
		5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	64.00	758.600.000,00		758.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	20.055.400,00		20.055.400,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	46.895.000,00		46.895.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	19.632.000,00		19.632.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	54.178.300,00		54.178.300,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	20.000.000,00		20.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	610.811.200,00		610.811.200,00	
		5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.00	999.091.900,00		999.091.900,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	154.100.000,00		154.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.00	120.000.000,00		120.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	624.000.000,00		624.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	16.050.000,00		16.050.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	24.840.000,00		24.840.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		671.445.000,00		671.445.000,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		671.445.000,00		671.445.000,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		467.445.000,00		467.445.000,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		467.445.000,00		467.445.000,00	
		5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	40.00	467.445.000,00		467.445.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	204.000.000,00		204.000.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				4.616.000.000,00		4.574.000.000,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				4.616.000.000,00		4.574.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.468.962.500,00		3.426.962.500,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.468.962.500,00		3.426.962.500,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.822.577.500,00		1.822.577.500,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.822.577.500,00		1.822.577.500,00	
		5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.00	52.500.000,00		52.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	664.985.700,00		664.985.700,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	356.241.800,00		356.241.800,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	343.750.000,00		343.750.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	305.100.000,00		305.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.00	100.000.000,00		100.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	27.100.000,00		27.100.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	18.000.000,00		18.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	936.000.000,00		936.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	20.000.000,00		20.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.00	3.750.000,00		3.750.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	599.535.000,00		599.535.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		1.147.037.500,00		1.147.037.500,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		147.037.500,00		147.037.500,00	
		5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		147.037.500,00		147.037.500,00	
		5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		144.000.000,00		144.000.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	144.000.000,00		144.000.000,00	
		5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.00	3.037.500,00		3.037.500,00	
		5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	100.00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.380.000.000,00		3.338.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.380.000.000,00		3.338.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.152.000.000,00		3.110.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.152.000.000,00		3.110.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.200.940.000,00		2.200.940.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		2.200.940.000,00		2.200.940.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	51.324.000,00		51.324.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	302.780.000,00		302.780.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	709.513.200,00		709.513.200,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	821.872.800,00		821.872.800,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	300.000.000,00		300.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.00	15.450.000,00		15.450.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	24.100.000,00		24.100.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	264.000.000,00		264.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	72.000.000,00		72.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	524.960.000,00		524.960.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		228.000.000,00		228.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		228.000.000,00		228.000.000,00	
		5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		228.000.000,00		228.000.000,00	
		5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		228.000.000,00		228.000.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	228.000.000,00		228.000.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				13.289.979.409,00		13.247.979.409,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG				8.289.979.409,00		8.247.979.409,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		7.322.842.700,00		7.280.842.700,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.322.842.700,00		7.280.842.700,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		4.826.342.700,00		4.826.342.700,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		4.826.342.700,00		4.826.342.700,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	214.892.000,00		214.892.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	359.303.000,00		359.303.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	625.047.700,00		625.047.700,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	147.000.000,00		147.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	3.316.100.000,00		3.316.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	100.00	140.000.000,00		140.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	283.800.000,00		283.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	252.000.000,00		252.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	200.000.000,00		200.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	47.300.000,00		47.300.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.00	670.000.000,00		670.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	45.000.000,00		45.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	956.400.000,00		956.400.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		967.136.709,00		967.136.709,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		95.157.300,00		95.157.300,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		95.157.300,00		95.157.300,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		95.157.300,00		95.157.300,00	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.00	95.157.300,00		95.157.300,00	
		5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.00	871.979.409,00		871.979.409,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.213.260.000,00		2.213.260.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		2.213.260.000,00		2.213.260.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	120.234.000,00		120.234.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	174.410.000,00		174.410.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	281.016.000,00		281.016.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	12.600.000,00		12.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	1.625.000.000,00		1.625.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	330.000.000,00		330.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	51.300.000,00		51.300.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	2.405.440.000,00		2.405.440.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.629.686.000,00		7.629.686.000,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				7.629.686.000,00		7.629.686.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		6.204.158.500,00		6.204.158.500,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.321.238.500,00		2.321.238.500,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		2.321.238.500,00		2.321.238.500,00	
		5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40.00	82.857.000,00		82.857.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	65.000.000,00		65.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	40.00	43.384.000,00		43.384.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	98.065.000,00		98.065.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	1.077.000,00		1.077.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	2.025.600,00		2.025.600,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	232.946.400,00		232.946.400,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	77.752.500,00		77.752.500,00	
		5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	40.00	24.600.000,00		24.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	40.00	2.360.000,00		2.360.000,00	
		5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	40.00	130.000.000,00		130.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	40.00	490.981.000,00		490.981.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	1.044.800.000,00		1.044.800.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	390.000,00		390.000,00	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.00	25.000.000,00		25.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	407.800.000,00		407.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	416.350.000,00		416.350.000,00	
		5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	62.50	430.000.000,00		430.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	40.00	900.000,00		900.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	100.00	54.000.000,00		54.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	40.00	62.030.000,00		62.030.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	90.000.000,00		90.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.00	12.000.000,00		12.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.870.940.000,00		1.870.940.000,00	
		5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	100.00	508.900.000,00		508.900.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		1.425.527.500,00		1.425.527.500,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		808.079.500,00		808.079.500,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		25.012.000,00		25.012.000,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		25.012.000,00		25.012.000,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	25.012.000,00		25.012.000,00	
		5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	40.00	743.580.000,00		743.580.000,00	
		5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	40.00	39.487.500,00		39.487.500,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	348.798.000,00		348.798.000,00	
		5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	100.00	268.650.000,00		268.650.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6.086.997.050,00		6.044.997.050,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN				6.086.997.050,00		6.044.997.050,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		4.094.063.050,00		4.052.063.050,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.094.063.050,00		4.052.063.050,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		3.565.643.050,00		3.565.643.050,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		3.565.643.050,00		3.565.643.050,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	135.000.000,00		135.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	35.335.000,00		35.335.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	46.895.000,00		46.895.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	19.632.000,00		19.632.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	61.606.000,00		61.606.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	50.000.000,00		50.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	20.228.000,00		20.228.000,00	
		5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.00	2.724.997.050,00		2.724.997.050,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	306.950.000,00		306.950.000,00	
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.00	165.000.000,00		165.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	420.000.000,00		420.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	25.020.000,00		25.020.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	41.400.000,00		41.400.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		1.992.934.000,00		1.992.934.000,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		993.268.000,00		993.268.000,00	
		5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu		993.268.000,00		993.268.000,00	
		5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat		993.268.000,00		993.268.000,00	
		5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	40.00	993.268.000,00		993.268.000,00	
		5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	100.00	999.666.000,00		999.666.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.432.589.100,00		3.390.589.100,00	
2.16.2.21.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				3.432.589.100,00		3.390.589.100,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		2.851.597.100,00		2.809.597.100,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		2.851.597.100,00		2.809.597.100,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.307.637.100,00		1.307.637.100,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.307.637.100,00		1.307.637.100,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	180.500.000,00		180.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	83.464.500,00		83.464.500,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	337.897.000,00		337.897.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	100.147.600,00		100.147.600,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	4.339.200,00		4.339.200,00	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.00	172.712.800,00		172.712.800,00	
		5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.00	1.076.000,00		1.076.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	202.500.000,00		202.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	225.000.000,00		225.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	22.300.000,00		22.300.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	9.900.000,00		9.900.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	492.000.000,00		492.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.00	148.590.000,00		148.590.000,00	
		5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	40.00	128.400.000,00		128.400.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	492.480.000,00		492.480.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	15.000.000,00		15.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	193.290.000,00		193.290.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		580.992.000,00		580.992.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		580.992.000,00		580.992.000,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		67.500.000,00		67.500.000,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		67.500.000,00		67.500.000,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	67.500.000,00		67.500.000,00	
		5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.00	513.492.000,00		513.492.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.292.099.000,00		5.250.099.000,00	
2.17.2.18.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN DAN KOPERASI				5.292.099.000,00		5.250.099.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		5.292.099.000,00		5.250.099.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		5.292.099.000,00		5.250.099.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		4.402.309.000,00		4.402.309.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		4.402.309.000,00		4.402.309.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	94.500.000,00		94.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.00	84.461.000,00		84.461.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	93.600.000,00		93.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	100.465.500,00		100.465.500,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	10.935.500,00		10.935.500,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	3.853.200,00		3.853.200,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.00	3.099.743.800,00		3.099.743.800,00	
		5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	40.00	750.000.000,00		750.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	64.750.000,00		64.750.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	100.000.000,00		100.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	540.000.000,00		540.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	32.520.000,00		32.520.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	215.270.000,00		215.270.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.617.874.000,00		3.575.874.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				3.617.874.000,00		3.575.874.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.018.014.000,00		2.976.014.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.288.504.000,00		2.288.504.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		2.288.504.000,00		2.288.504.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	10.041.500,00		10.041.500,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	48.835.200,00		48.835.200,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	40.741.600,00		40.741.600,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	20.000.000,00		20.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	5.220.000,00		5.220.000,00	
		5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	40.00	327.485.700,00		327.485.700,00	
		5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.00	1.499.680.000,00		1.499.680.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	154.000.000,00		154.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	70.000.000,00		70.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.00	112.500.000,00		112.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	148.250.000,00		148.250.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	276.000.000,00		276.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	19.260.000,00		19.260.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	244.000.000,00		244.000.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		599.860.000,00		599.860.000,00	
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		599.860.000,00		599.860.000,00	
		5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		599.860.000,00		599.860.000,00	
		5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		599.860.000,00		599.860.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.00	599.860.000,00		599.860.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.587.184.000,00		2.545.184.000,00	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				2.587.184.000,00		2.545.184.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		2.085.325.800,00		2.043.325.800,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		2.085.325.800,00		2.043.325.800,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		942.118.800,00		942.118.800,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		942.118.800,00		942.118.800,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	240.996.800,00		240.996.800,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	51.053.000,00		51.053.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	99.409.000,00		99.409.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	30.660.000,00		30.660.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	500.000.000,00		500.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	20.000.000,00		20.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	528.000.000,00		528.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	9.000.000,00		9.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	52.800.000,00		52.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	511.407.000,00		511.407.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		501.858.200,00		501.858.200,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		136.668.200,00		136.668.200,00	
		5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		48.668.200,00		48.668.200,00	
		5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi		48.668.200,00		48.668.200,00	
		5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	40.00	48.668.200,00		48.668.200,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	88.000.000,00		88.000.000,00	
		5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	100.00	365.190.000,00		365.190.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2.012.164.352,00		1.970.164.352,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				2.012.164.352,00		1.970.164.352,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.250.000.000,00		1.208.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.250.000.000,00		1.208.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		851.038.000,00		851.038.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		851.038.000,00		851.038.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	72.000.000,00		72.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	184.890.000,00		184.890.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	118.814.800,00		118.814.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	2.394.200,00		2.394.200,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	42.000.000,00		42.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	15.689.000,00		15.689.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	415.250.000,00		415.250.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	19.600.000,00		19.600.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	36.000.000,00		36.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	48.000.000,00		48.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	36.000.000,00		36.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	193.362.000,00		193.362.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		762.164.352,00		762.164.352,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		199.968.000,00		199.968.000,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		199.968.000,00		199.968.000,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		199.968.000,00		199.968.000,00	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.00	199.968.000,00		199.968.000,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	540.196.352,00		540.196.352,00	
		5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	100.00	22.000.000,00		22.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.115.176.693,00		17.989.176.693,00	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.145.925.300,00		7.103.925.300,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN				7.145.925.300,00		7.103.925.300,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.263.300.000,00		3.221.300.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.263.300.000,00		3.221.300.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.496.446.500,00		2.496.446.500,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		2.496.446.500,00		2.496.446.500,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	200.000.000,00		200.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	100.00	196.530.000,00		196.530.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	553.057.000,00		553.057.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	256.468.000,00		256.468.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	27.305.500,00		27.305.500,00	
		5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.00	499.366.000,00		499.366.000,00	
		5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	40.00	303.120.000,00		303.120.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	460.600.000,00		460.600.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	34.600.000,00		34.600.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	36.000.000,00		36.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	144.000.000,00		144.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	271.999.500,00		271.999.500,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	214.254.000,00		214.254.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		3.882.625.300,00		3.882.625.300,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.382.625.300,00		2.382.625.300,00	
		5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian		2.382.625.300,00		2.382.625.300,00	
		5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan		2.382.625.300,00		2.382.625.300,00	
		5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	40.00	2.382.625.300,00		2.382.625.300,00	
		5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	100.00	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		5.538.000,00		5.538.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		5.538.000,00		5.538.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		5.538.000,00		5.538.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		5.538.000,00		5.538.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	780.000,00		780.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	4.758.000,00		4.758.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		1.494.462.000,00		1.494.462.000,00	
		5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.494.462.000,00		1.494.462.000,00	
		5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		1.494.462.000,00		1.494.462.000,00	
		5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan		1.494.462.000,00		1.494.462.000,00	
		5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	100.00	1.494.462.000,00		1.494.462.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.418.000.000,00		4.376.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN				4.418.000.000,00		4.376.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.998.803.000,00		3.956.803.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.998.803.000,00		3.956.803.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		3.097.643.000,00		3.097.643.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		3.097.643.000,00		3.097.643.000,00	
		5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40.00	511.997.600,00		511.997.600,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	48.000.000,00		48.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	40.00	300.000.000,00		300.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	40.00	999.739.500,00		999.739.500,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	98.100.000,00		98.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	11.046.700,00		11.046.700,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	8.365.800,00		8.365.800,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	90.989.100,00		90.989.100,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	8.430.000,00		8.430.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	125.040.000,00		125.040.000,00	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.00	3.234.300,00		3.234.300,00	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	40.00	5.700.000,00		5.700.000,00	
		5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	40.00	136.500.000,00		136.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	710.500.000,00		710.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	40.000.000,00		40.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	100.250.000,00		100.250.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	264.000.000,00		264.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	7.500.000,00		7.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	487.410.000,00		487.410.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		419.197.000,00		419.197.000,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		419.197.000,00		419.197.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar		349.920.000,00		349.920.000,00	
		5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat		349.920.000,00		349.920.000,00	
		5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	40.00	349.920.000,00		349.920.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.00	9.277.000,00		9.277.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.565.000.000,00		1.565.000.000,00	
3.30.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				1.565.000.000,00		1.565.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.216.994.200,00		1.216.994.200,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.216.994.200,00		1.216.994.200,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		821.944.200,00		821.944.200,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		821.944.200,00		821.944.200,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	139.718.500,00		139.718.500,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	13.844.800,00		13.844.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	46.280.900,00		46.280.900,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	2.700.000,00		2.700.000,00	
		5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	40.00	400.000.000,00		400.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	219.400.000,00		219.400.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	40.400.000,00		40.400.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	324.650.000,00		324.650.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		348.005.800,00		348.005.800,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		348.005.800,00		348.005.800,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		306.894.300,00		306.894.300,00	
		5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		299.394.300,00		299.394.300,00	
		5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.00	299.394.300,00		299.394.300,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	7.500.000,00		7.500.000,00	
		5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	40.00	30.399.500,00		30.399.500,00	
		5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.00	10.712.000,00		10.712.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.486.251.393,00		3.444.251.393,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		2.163.300.700,00		2.121.300.700,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		2.163.300.700,00		2.121.300.700,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.301.106.700,00		1.301.106.700,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.301.106.700,00		1.301.106.700,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	194.685.600,00		194.685.600,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	12.328.800,00		12.328.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	36.385.600,00		36.385.600,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	26.476.700,00		26.476.700,00	
		5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	40.00	17.230.000,00		17.230.000,00	
		5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	40.00	800.000.000,00		800.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	109.000.000,00		109.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.00	75.000.000,00		75.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	2.600.000,00		2.600.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	552.000.000,00		552.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	40.00	6.868.000,00		6.868.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	9.282.000,00		9.282.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	249.444.000,00		249.444.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		1.322.950.693,00		1.322.950.693,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		805.699.100,00		805.699.100,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		729.622.100,00		729.622.100,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		729.622.100,00		729.622.100,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	40.00	695.547.500,00		695.547.500,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	34.074.600,00		34.074.600,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	66.800.000,00		66.800.000,00	
		5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.00	9.277.000,00		9.277.000,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	499.751.593,00		499.751.593,00	
		5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.00	17.500.000,00		17.500.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				99.761.427.817,00		99.641.427.817,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				57.724.958.560,00		57.646.958.560,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH				47.224.958.560,00		47.182.958.560,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		40.000.885.400,00		39.958.885.400,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		40.000.885.400,00		39.958.885.400,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		22.102.245.400,00		22.102.245.400,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		22.102.245.400,00		22.102.245.400,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	1.801.820.000,00		1.801.820.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	1.750.890.800,00		1.750.890.800,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	1.556.612.000,00		1.556.612.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	3.121.286.600,00		3.121.286.600,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	700.000.000,00		700.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	92.400.000,00		92.400.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	657.736.000,00		657.736.000,00	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.00	600.000.000,00		600.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	8.476.600.000,00		8.476.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	3.344.900.000,00		3.344.900.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	409.500.000,00		409.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	24.270.000,00		24.270.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	2.544.000.000,00		2.544.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	5.928.000.000,00		5.928.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	800.000.000,00		800.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	125.680.000,00		125.680.000,00	
		5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	40.00	300.000.000,00		300.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.00	15.000.000,00		15.000.000,00	
		5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	40.00	10.000.000,00		10.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	40.00	598.180.000,00		598.180.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	7.102.010.000,00		7.102.010.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		7.224.073.160,00		7.224.073.160,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.249.958.600,00		1.249.958.600,00	
		5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		500.000.000,00		500.000.000,00	
		5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		500.000.000,00		500.000.000,00	
		5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.00	500.000.000,00		500.000.000,00	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.00	749.958.600,00		749.958.600,00	
		5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	100.00	978.611.760,00		978.611.760,00	
		5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	100.00	4.995.502.800,00		4.995.502.800,00	
4.01.0.00.0.00.01.0001	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		824.966.000,00		824.966.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		824.966.000,00		824.966.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	193.258.900,00		193.258.900,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	59.431.500,00		59.431.500,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	162.075.600,00		162.075.600,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	33.600.000,00		33.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	376.600.000,00		376.600.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	25.950.000,00		25.950.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	190.900.000,00		190.900.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	48.900.000,00		48.900.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	679.284.000,00		679.284.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0002	KEPALA BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT				500.000.000,00		500.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		500.000.000,00		500.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		284.216.000,00		284.216.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		284.216.000,00		284.216.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	14.676.000,00		14.676.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	45.130.000,00		45.130.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	17.080.000,00		17.080.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	89.980.000,00		89.980.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	117.350.000,00		117.350.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	215.784.000,00		215.784.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4.01.0.00.0.00.01.0003	KEPALA BAGIAN HUKUM				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		840.000.000,00		840.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		294.439.000,00		294.439.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		294.439.000,00		294.439.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	10.156.700,00		10.156.700,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	7.841.800,00		7.841.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	21.799.000,00		21.799.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	1.875.000,00		1.875.000,00	
		5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	40.00	1.816.500,00		1.816.500,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	250.950.000,00		250.950.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	50.400.000,00		50.400.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	94.800.000,00		94.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	34.155.000,00		34.155.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.00	13.450.000,00		13.450.000,00	
		5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.00	50.000.000,00		50.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	45.000.000,00		45.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	257.756.000,00		257.756.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		160.000.000,00		160.000.000,00	
		5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		160.000.000,00		160.000.000,00	
		5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		160.000.000,00		160.000.000,00	
		5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		160.000.000,00		160.000.000,00	
		5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.00	160.000.000,00		160.000.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0004	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN				700.000.000,00		700.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		700.000.000,00		700.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		700.000.000,00		700.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		393.020.000,00		393.020.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		393.020.000,00		393.020.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	6.473.000,00		6.473.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	21.726.000,00		21.726.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	25.821.000,00		25.821.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	339.000.000,00		339.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	27.000.000,00		27.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	279.980.000,00		279.980.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0005	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				700.000.000,00		700.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		700.000.000,00		700.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01	Belanja Barang		340.104.000,00		340.104.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		340.104.000,00		340.104.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	29.415.000,00		29.415.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	73.081.000,00		73.081.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	32.608.000,00		32.608.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	205.000.000,00		205.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	359.896.000,00		359.896.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0006	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				3.000.000.000,00		2.964.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		2.763.353.500,00		2.727.353.500,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		897.918.500,00		897.918.500,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		897.918.500,00		897.918.500,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	22.500.000,00		22.500.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	115.441.900,00		115.441.900,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	59.052.000,00		59.052.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	150.852.600,00		150.852.600,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	76.840.000,00		76.840.000,00	
		5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	40.00	23.232.000,00		23.232.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	450.000.000,00		450.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	88.200.000,00		88.200.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	181.080.000,00		181.080.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	63.000.000,00		63.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	72.50	651.000.000,00		615.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	150.000.000,00		150.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	732.155.000,00		732.155.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		236.646.500,00		236.646.500,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		236.646.500,00		236.646.500,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		22.500.000,00		22.500.000,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		22.500.000,00		22.500.000,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	22.500.000,00		22.500.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	189.000.000,00		189.000.000,00	
		5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.00	25.146.500,00		25.146.500,00	
4.01.0.00.0.00.01.0007	KEPALA BAGIAN UMUM				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		536.108.000,00		536.108.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		536.108.000,00		536.108.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	110.450.000,00		110.450.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	106.913.600,00		106.913.600,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	129.194.400,00		129.194.400,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	4.200.000,00		4.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	185.350.000,00		185.350.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	9.340.000,00		9.340.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	11.440.000,00		11.440.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	443.112.000,00		443.112.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0008	KEPALA BAGIAN ORGANISASI				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		577.184.000,00		577.184.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		577.184.000,00		577.184.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	34.721.000,00		34.721.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	129.391.000,00		129.391.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	93.072.000,00		93.072.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	320.000.000,00		320.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	121.280.000,00		121.280.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	301.536.000,00		301.536.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4.01.0.00.0.00.01.0009	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				800.000.000,00		800.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		634.737.400,00		634.737.400,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		159.117.400,00		159.117.400,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		159.117.400,00		159.117.400,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	15.000.000,00		15.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	5.670.400,00		5.670.400,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	24.953.000,00		24.953.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	3.444.000,00		3.444.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	1.050.000,00		1.050.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	109.000.000,00		109.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	40.00	209.300.000,00		209.300.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	266.320.000,00		266.320.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		165.262.600,00		165.262.600,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		165.262.600,00		165.262.600,00	
		5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		54.756.000,00		54.756.000,00	
		5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		54.756.000,00		54.756.000,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	54.756.000,00		54.756.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	40.00	48.668.200,00		48.668.200,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	17.000.000,00		17.000.000,00	
		5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.00	44.838.400,00		44.838.400,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				42.036.469.257,00		41.994.469.257,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD				42.036.469.257,00		41.994.469.257,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		35.882.311.200,00		35.840.311.200,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		35.882.311.200,00		35.840.311.200,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		12.345.900.200,00		12.345.900.200,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		12.345.900.200,00		12.345.900.200,00	
		5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.00	86.944.000,00		86.944.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	2.186.395.000,00		2.186.395.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	211.838.800,00		211.838.800,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	2.006.190.800,00		2.006.190.800,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	16.800.000,00		16.800.000,00	
		5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.00	212.731.600,00		212.731.600,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	6.235.000.000,00		6.235.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	1.390.000.000,00		1.390.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	63.250.000,00		63.250.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	840.000.000,00		840.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	40.00	375.000.000,00		375.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.00	500.000.000,00		500.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	21.716.161.000,00		21.716.161.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		6.154.158.057,00		6.154.158.057,00	
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		6.154.158.057,00		6.154.158.057,00	
		5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		5.097.166.027,00		5.097.166.027,00	
		5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		5.097.166.027,00		5.097.166.027,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	4.279.688.755,00		4.279.688.755,00	
		5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.00	817.477.272,00		817.477.272,00	
		5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	100.00	1.056.992.030,00		1.056.992.030,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				83.108.584.978,00		82.940.584.978,00	
5.01	PERENCANAAN				7.700.278.000,00		7.658.278.000,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7.700.278.000,00		7.658.278.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		7.700.278.000,00		7.658.278.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.700.278.000,00		7.658.278.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.930.199.000,00		2.930.199.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		2.930.199.000,00		2.930.199.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	342.474.400,00		342.474.400,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	346.700.400,00		346.700.400,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	520.224.200,00		520.224.200,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	14.700.000,00		14.700.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	1.436.100.000,00		1.436.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	150.000.000,00		150.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.00	120.000.000,00		120.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	109.800.000,00		109.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	131.750.000,00		131.750.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	600.000.000,00		600.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	345.000.000,00		345.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.00	26.910.000,00		26.910.000,00	
		5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.00	200.000.000,00		200.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	3.314.619.000,00		3.314.619.000,00	
5.02	KEUANGAN				66.950.306.978,00		66.866.306.978,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				62.504.306.988,00		62.462.306.988,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		41.550.721.352,00		41.508.721.352,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		23.553.448.000,00		23.553.448.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		23.553.448.000,00		23.553.448.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	750.570.000,00		750.570.000,00	
		5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.00	51.195.000,00		51.195.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	3.546.708.000,00		3.546.708.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	2.874.530.600,00		2.874.530.600,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	4.595.654.400,00		4.595.654.400,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	416.425.000,00		416.425.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	411.205.000,00		411.205.000,00	
		5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	40.00	73.360.000,00		73.360.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	9.951.000.000,00		9.951.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	858.800.000,00		858.800.000,00	
		5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	88.000.000,00		88.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	575.800.000,00		575.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	60.00	232.605.000,00		232.605.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.84	680.000.000,00		680.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	85.00	2.868.000.000,00		2.868.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	100.00	870.000.000,00		870.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	99.29	86.000.000,00		86.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	499.999.500,00		499.999.500,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	1.046.950.000,00		1.046.950.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	100.00	670.134.000,00		670.134.000,00	
		5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	40.00	221.367.048,00		221.367.048,00	
		5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	40.00	276.708.804,00		276.708.804,00	
		5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	40.00	240.000.000,00		240.000.000,00	
		5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	40.00	163.200.000,00		163.200.000,00	
		5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	99.75	96.000.000,00		96.000.000,00	
		5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	100.00	87.500.000,00		87.500.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.00	34.000.000,00		34.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	165.000.000,00		165.000.000,00	
		5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	100.00	1.950.000.000,00		1.950.000.000,00	
		5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	40.00	750.000.000,00		750.000.000,00	
		5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	40.00	65.622.000,00		65.622.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	5.730.387.000,00		5.730.387.000,00	
		5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	100.00	558.000.000,00		558.000.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		20.953.585.636,00		20.953.585.636,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8.027.400.000,00		8.027.400.000,00	
		5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan		8.027.400.000,00		8.027.400.000,00	
		5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		8.027.400.000,00		8.027.400.000,00	
		5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	40.00	8.027.400.000,00		8.027.400.000,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	3.252.155.636,00		3.252.155.636,00	
		5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	100.00	9.461.405.000,00		9.461.405.000,00	
		5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	40.00	212.625.000,00		212.625.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				4.445.999.990,00		4.403.999.990,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		4.417.408.400,00		4.375.408.400,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.417.408.400,00		4.375.408.400,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.013.740.400,00		2.013.740.400,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		2.013.740.400,00		2.013.740.400,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	102.000.000,00		102.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	142.003.000,00		142.003.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	189.416.000,00		189.416.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	113.921.400,00		113.921.400,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	126.000.000,00		126.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	826.400.000,00		826.400.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	490.000.000,00		490.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	34.700.000,00		34.700.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	15.750.000,00		15.750.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	120.000.000,00		120.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	300.000.000,00		300.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	5.724.000,00		5.724.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	45.000.000,00		45.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.756.494.000,00		1.756.494.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		28.591.590,00		28.591.590,00	
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		28.591.590,00		28.591.590,00	
		5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		28.591.590,00		28.591.590,00	
		5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		28.591.590,00		28.591.590,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	28.591.590,00		28.591.590,00	
5.03	KEPEGAWAIAN				4.658.000.000,00		4.616.000.000,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.658.000.000,00		4.616.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.664.576.000,00		3.622.576.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.664.576.000,00		3.622.576.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.444.638.000,00		1.444.638.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.444.638.000,00		1.444.638.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	428.028.800,00		428.028.800,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	120.782.000,00		120.782.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	241.787.200,00		241.787.200,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	86.940.000,00		86.940.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	567.100.000,00		567.100.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	54.000.000,00		54.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	67.250.000,00		67.250.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	48.000.000,00		48.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	48.000.000,00		48.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	155.640.000,00		155.640.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.00	34.200.000,00		34.200.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.686.848.000,00		1.686.848.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		993.424.000,00		993.424.000,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		140.000.000,00		140.000.000,00	
		5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		140.000.000,00		140.000.000,00	
		5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		140.000.000,00		140.000.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	140.000.000,00		140.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.00	853.424.000,00		853.424.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.303.927.000,00		1.303.927.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.303.927.000,00		1.303.927.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	276.473.000,00		276.473.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	72.541.000,00		72.541.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	252.413.000,00		252.413.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	105.000.000,00		105.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	597.500.000,00		597.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	106.525.000,00		106.525.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	11.500.000,00		11.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	299.280.000,00		299.280.000,00	
		5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.00	45.000.000,00		45.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	40.00	20.000.000,00		20.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	1.213.768.000,00		1.213.768.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				800.000.000,00		800.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				800.000.000,00		800.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		800.000.000,00		800.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		357.738.000,00		357.738.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		357.738.000,00		357.738.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	26.471.000,00		26.471.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	72.250.000,00		72.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	111.417.000,00		111.417.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	12.600.000,00		12.600.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	135.000.000,00		135.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	9.250.000,00		9.250.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	6.480.000,00		6.480.000,00	
		5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.00	30.000.000,00		30.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	75.000.000,00		75.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	321.532.000,00		321.532.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.016.835.900,00		10.974.835.900,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				11.016.835.900,00		10.974.835.900,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT				11.016.835.900,00		10.974.835.900,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		6.064.649.800,00		6.022.649.800,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01	Belanja Barang		936.646.000,00		936.646.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		936.646.000,00		936.646.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	246.480.000,00		246.480.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	55.874.000,00		55.874.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	88.254.000,00		88.254.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	82.838.000,00		82.838.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.00	13.200.000,00		13.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	450.000.000,00		450.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	29.650.000,00		29.650.000,00	
		5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.00	96.300.000,00		96.300.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	621.900.000,00		621.900.000,00	
		5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	40.00	792.275.000,00		792.275.000,00	
		5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.00	54.020.000,00		54.020.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	15.000.000,00		15.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	40.00	5.100.000,00		5.100.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	100.00	55.609.800,00		55.609.800,00	
		5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	40.00	382.900.000,00		382.900.000,00	
		5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	40.00	45.950.000,00		45.950.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	2.987.299.000,00		2.987.299.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		4.952.186.100,00		4.952.186.100,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.777.902.100,00		2.777.902.100,00	
		5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar		58.338.300,00		58.338.300,00	
		5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu		58.338.300,00		58.338.300,00	
		5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	40.00	58.338.300,00		58.338.300,00	
		5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	40.00	1.252.000.000,00		1.252.000.000,00	
		5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	40.00	700.000.000,00		700.000.000,00	
		5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.00	55.000.000,00		55.000.000,00	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.00	439.582.800,00		439.582.800,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.00	72.981.000,00		72.981.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	200.000.000,00		200.000.000,00	
		5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.00	2.143.909.000,00		2.143.909.000,00	
		5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	40.00	30.375.000,00		30.375.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.248.000.000,00		6.038.000.000,00	
7.01	KECAMATAN				6.248.000.000,00		6.038.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
7.01.0.00.0.00.01.0000	DISTRİK TIGI				1.196.000.000,00		1.154.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.196.000.000,00		1.154.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.196.000.000,00		1.154.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		860.702.000,00		860.702.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		860.702.000,00		860.702.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	161.309.100,00		161.309.100,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	132.989.300,00		132.989.300,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	48.953.600,00		48.953.600,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	417.450.000,00		417.450.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	100.000.000,00		100.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	180.000.000,00		180.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.00	24.000.000,00		24.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	89.298.000,00		89.298.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	DISTRİK TIGI BARAT				1.160.000.000,00		1.118.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.160.000.000,00		1.118.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		783.290.000,00		783.290.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		783.290.000,00		783.290.000,00	
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	42.000.000,00		42.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	242.085.000,00		242.085.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	10.180.000,00		10.180.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	175.675.000,00		175.675.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40.00	75.000.000,00		75.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	215.850.000,00		215.850.000,00	
		5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.00	22.500.000,00		22.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	27.350.000,00		27.350.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	72.000.000,00		72.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	96.000.000,00		96.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	40.00	12.960.000,00		12.960.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.00	20.000.000,00		20.000.000,00	
		5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.00	60.000.000,00		60.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	46.400.000,00		46.400.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	DISTRIK TIGI TIMUR				1.136.000.000,00		1.094.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.038.720.000,00		996.720.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		852.720.000,00		852.720.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		852.720.000,00		852.720.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.00	50.000.000,00		50.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	118.523.800,00		118.523.800,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	8.571.000,00		8.571.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	72.575.200,00		72.575.200,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	603.050.000,00		603.050.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	144.000.000,00		144.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.2	BELANJA MODAL		97.280.000,00		97.280.000,00	
		5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		97.280.000,00		97.280.000,00	
		5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		97.280.000,00		97.280.000,00	
		5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas		97.280.000,00		97.280.000,00	
		5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	100.00	97.280.000,00		97.280.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	DISTRIK BOUWOBADO				1.234.000.000,00		1.192.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.234.000.000,00		1.192.000.000,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.234.000.000,00		1.192.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		953.200.000,00		953.200.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		953.200.000,00		953.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	98.362.500,00		98.362.500,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	202.931.500,00		202.931.500,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	64.406.000,00		64.406.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	587.500.000,00		587.500.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	72.000.000,00		72.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.00	120.000.000,00		120.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	46.800.000,00		46.800.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	DISTRIK KAPIRAYA				1.522.000.000,00		1.480.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		1.522.000.000,00		1.480.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		800.650.000,00		800.650.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		800.650.000,00		800.650.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	66.035.700,00		66.035.700,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	58.229.500,00		58.229.500,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	113.084.800,00		113.084.800,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	563.300.000,00		563.300.000,00	
		5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.00	480.000.000,00		480.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	199.350.000,00		199.350.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				2.250.000.000,00		2.208.000.000,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.250.000.000,00		2.208.000.000,00	
1.05.8.01.0.00.03.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.250.000.000,00		2.208.000.000,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		2.200.000.000,00		2.158.000.000,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		1.333.310.000,00		1.333.310.000,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		1.333.310.000,00		1.333.310.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.00	26.653.800,00		26.653.800,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.00	57.555.200,00		57.555.200,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.00	173.401.000,00		173.401.000,00	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.00	1.050.700.000,00		1.050.700.000,00	
		5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.00	25.000.000,00		25.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.00	54.000.000,00		54.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.00	408.000.000,00		408.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.33	42.000.000,00		0,00	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.00	362.690.000,00		362.690.000,00	
		5.2	BELANJA MODAL		50.000.000,00		50.000.000,00	
		5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		50.000.000,00		50.000.000,00	
		5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		50.000.000,00		50.000.000,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit		50.000.000,00		50.000.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.00	50.000.000,00		50.000.000,00	
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA					627.936.635.726,00			
TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					606.563.301.726,00			
PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					96,60%			